

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN BAJUIN
TAHUN 2021**



captured by
Ramma Pratama

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BAJUIN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin Tahun 2021 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bajuin sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2019–2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bajuin tahun 2021 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Bajuin, 10 Februari 2022

KECAMATAN BAJUIN

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19820323 200012 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bajuin Tahun 2021 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajuin kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Bajuin Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja kedua RPJMD 2018 – 2023. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini juga merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bajuin kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan kecamatan Bajuin dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 sasaran yang diukur 1 Indikator kinerja Utama dan 3 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 24 indikator, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 dapat dikatakan **Sangat Baik/ Sangat Berhasil**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2021 dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Bajuin Tahun 2021.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan. Indikator kinerja program yang terdiri dari 3 sasaran dan 24 Indikator kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 110,63 % dengan rincian 22 (Dua Puluh satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2021 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, serta menghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Bajuin, 10 Februari 2022

PLT. CAMAT BAJUIN



H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19820323 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Startegis	20
D. Produk dan Layanan	22
E. Sistematika Penyajian	23
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
A. Visi	25
B. Misi	28
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	29
D. Indikator Kinerja Utama	31
E. Perjanjian Kinerja	32
F. Program dan Kegiatan	36
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	39
B. Akuntabilitas Keuangan	84
BAB IV. PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Strategi Peningkatan Kinerja	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
1	Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kecamatan Bajuin 15
2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Lingkup Kecamatan Bajuin 16
3	Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kecamatan Bajuin 17
4	Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kecamatan Bajuin..... 18
5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bajuin 21
6	Sasaran strategis, indikator dan target Kecamatan Bajuin Tahun 2021..... 29
7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2023 30
8	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Tahun 2021 31
9	Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Camat, Eselon III dan Eselon IV Kecamatan Bajuin Tahun 2021. 33
10	Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2021..... 36
11	Pengelompokan Capaian Kinerja 40
12	Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Bajuin Tahun 2020 41
13	Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2021 42
14	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bajuin 45
15	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2021..... 46
16	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2021 46
17	Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021 49
18	Sasaran Strategis, indikator, target, realisasi dan capaian Sekretariat Kecamatan Bajuin Tahun 2021 50
19	Realisasi, Target dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Bajuin 50
20	Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin Tahun 2019 berdasarkan komponen penilaian 51

21	Realisasi Capaian SAKIP Kecamatan Bajuin Tahun 2020 dan persentase capaian Kinerja Terhadap Target SAKIP Tahun 2021	52
22	Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021	53
23	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Ta. 2021	54
24	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ta. 2021.....	57
25	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan Ta. 2021	62
26	Jenis Bantuan Sosial dan Jumlah Penerima Bantuan Kecamatan Bajuin Ta. 2021	63
27	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Ta. 2021	66
28	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan Ta. 2021	69
29	Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2021	70
30	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Ta. 2021.....	72
31	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Ta. 2021.....	75
32	Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2020-2021	77
33	Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Bajuin tahun 2019-2021.....	82
34	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021.....	84
35	Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2021.....	85
36	Realisasi Persentase keuangan, Fisik dan efisiensi Sasaran StrategisKecamatan BajuinTahun 2021.....	86
37	Perbandingan Program dan Kegiatan Serta Pagu Anggaran Kecamatan Bajuin Tahun 2020-2021	87
38	Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Bajuin Tahun 2020-2021	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1 Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin Tahun 2020.....	2
2 Grafik Realisasi Target dan Persentase Capaian Realisasi IKM kantor Kecamatan Bajuin terhadap target Tahun 2018-2020	46
3 Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Kunyit Periode 2021-2023.....	55
4 Penyerahan Surat Suara dari Dinas PMD Kab. Tanah Laut ke Kantor Kecamatan Bajuin untuk Pemilihan Kepala Desa Sungai Bakar didampingi pihak POLRI dan TNI.....	56
5 Pelaksanaan HUT RI 17 Agustus 2021 di Kantor Kecamatan Bajuin, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat	56
6 Evaluasi Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 Desa se Kecamatan Bajuin yang difasilitasi oleh Tim APBDes Kecamatan Bajuin.....	58
7 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa se Kecamatan Bajuin dari Dinas PMD. Kab. Tanah Laut beserta Tim Pendamping Desa dan Kejaksaa RI.....	59
8 Edukasi Perpajakan Bendahara Desa yang difasilitasi oleh Kecamatan Bajuin bersama KP2KP Pelaihari	59
9 Pelaksanaan Musrenbang Desa Bajuin Kecamatan Bajuin dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022.....	60
10 Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Kebersihan Kantor Desa Se-Kecamatan Bajuin Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut Ke-56 Tahun 2021 Di Aula Kantor Kecamatan Bajuin.....	60
11 Penyerahan Simbolis sertifikat PTSL dirangkaikan penyerahan BLT Dana Desa pada Kegiatan Manunggal Tuntung Pandang di Desa Galam pada tanggal 23 April 2021.....	64
12 Penyaluran BLT Dana Desa Pematang.....	64
13 Musdes penetapan daftar sementara pengguna LPG 3kg bersubsidi di Desa Tanjung Kec. Bajuin pada tanggal 20 Mei 2021.....	65
14 Musdes penetapan daftar sementara pengguna LPG 3kg bersubsidi di Desa Pematang	65

15	Sosialisasi Penyuluhan Hukum tentang Narkoba pada Masyarakat Kecamatan Bajuin Tahun tanggal 12 Oktober 2021	67
16	Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut Tingkat Kecamatan Bajuin di Aula Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2021	68
17	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.....	71
18	Apel Pagi Karyawan di Halaman Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut	73
19	Penyerahan Penghargaan kepada ASN Teladan Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2021	74
20	Sosialisasi Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD TA.2021	75
21	Kegiatan Asistensi RKA-DPA Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2021	76
22	Rapat Internal Kantor Kecamatan Bajuin terkait evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan	76

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1 Nilai Rata-Rata (NRR) Unsur-Unsur Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2021.....	48

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

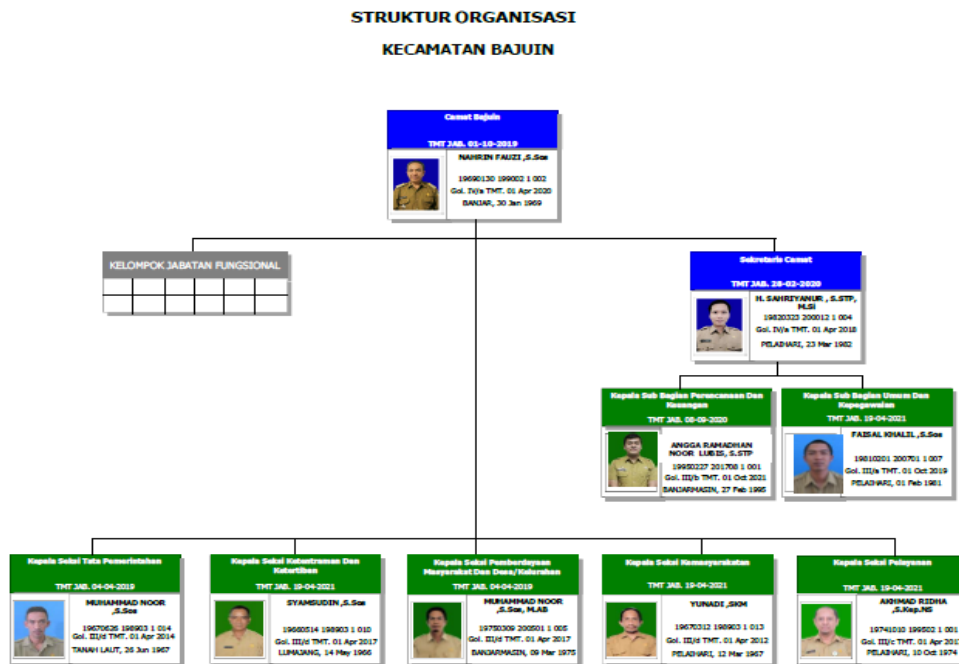
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut Camat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kecamatan Bajuin secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bahan dan media penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pertanggungjawaban Bupati kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Bajuin Tahun 2021

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/kelurahan
- f. Seksi Kemasyarakatan
- g. Seksi Pelayanan, dan
- h. Kelompok jabatan fungsional.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uaian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
 - i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
 - j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
 - k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
 - l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
 - q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Bajuin untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapidengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Bajuin dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bajuin ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;

-
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
 - f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
 - h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa;
 - l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
 - m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
 - n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

-
- lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
 - h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
 - j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
 - k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
 - l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 1. Penanggulangan bencana.
 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
-

-
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
 - o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
 - p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
 - q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;

- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

-
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
 - f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
 - g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
 - h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
 - k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
 - l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
 - m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Bajuin didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin sebanyak 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang PNS dan 8 (delapan) Orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

No.	Nama Jabatan	Esselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1	Camat	III.a	1		1
2	Sekretaris	III.b	1		1
	a. Kasubag. Umum dan Kepegawaian	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	4	5
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	1	3
3	Kasi tata Pemerintahan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
4	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)				0
5	kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)			1	1
6	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
7	Kasi Pelayanan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	2	2
JUMLAH			14	8	22

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor kecamatan Bajuin untuk golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 8 (delapan) orang, golongan II sebanyak 3 (tiga) orang dan golongan I sebanyak 1 (satu) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	-
5.	Pembina	IV/a	2
JUMLAH			2
6.	Penata Tk.I	III/d	4
7.	Penata	III/c	1
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	2
9.	Penata Muda	III/a	1
JUMLAH			8
10.	Pengatur Tk.I	II/d	1
11.	Pengatur	II/c	2
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
JUMLAH			3
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	1
16.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			1
TOTAL			14

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Bajuin untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 2 (dua) orang, Jenjang SLTA/SMK sebanyak 8 orang, Jenjang D3 sebanyak 2 (dua) orang, jenjang D.4/S1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Org)		
		PNS	Non PNS/PTT	Jumlah
1.	SEKOLAH DASAR	1	1	2
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA/SMK	2	6	8
4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	2	1	3
7.	D.4	1	-	1
8.	SARJANA	6	-	6
9.	MASTER/PASCASARJANA	2	-	2
10.	DOKTER/S3	-	-	-
JUMLAH		14	8	22

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparat Kecamatan Bajuin didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Bajuin

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1	Tanah perkantoran	3 ha	3 ha	-	-
2	Gedung kantor	1	1	-	-
3	Bangunan rumah dinas camat	1	1	-	-
4	Bangunan tempat parkir	1	1	-	-
5	Kendaraan Roda 2	8	8	-	-
6	Kendaraan Roda 4	1	1	-	-
7	Komputer	5	5	-	-
8	Laptop	5	5	-	-
9	Printer	9	9	-	-
10	Mesin tik	2	2	-	-
11	Kursi Lipat	70	70	-	-
12	Kursi Tamu	1	1	-	-
13	Kursi Putar	2	2	-	-
14	Meja Kerja	14	14	-	-
15	Meja Rapat	22	22	-	-
16	Whiteboard	2	2	-	-
17	Filling Cabinet	8	8	-	-
18	Tempat tidur	2	2	-	-
19	Papan struktur	8	8	-	-
20	Lemari Es	2	2	-	-
21	Rak besi	2	2	-	-
22	Mesin potong rumput	3	3	-	-
23	TV	4	4	-	-

Lanjut...

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
24	Brangkas	1	1	-	-
24	Wirelles	2	2	-	-
26	Parabola	1	1	-	-
27	CPU	2	2	-	-
28	AC	4	4	-	-
29	Jam dinding	1	1	-	-
30	Kipas Angin	5	5	-	-
31	Dispenser	1	1	-	-
32	LCD Proyektor	1	1	-	-
33	Soundsystem	1	1	-	-
34	Lemari Arsip	12	12	-	-
35	UPS	6	6	-	-
36	Kursi kerja	5	5	-	-
37	Sofa	2	2	-	-
38	Gorden	1	1	-	-

C. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip;
- c) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 terutama untuk memakai masker.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten;
- d) Belum optimalnya Penyusunan APBDES;
- e) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya yang baik.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bajuin;
- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjangnya;
- c) Masih kurangnya kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik;
- d) Masih terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bajuin

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19	Belum optimalnya edukasi terhadap masyarakat terkait protokol kesehatan untuk mencegah virus covid-19
2	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
		Belum optimalnya Penyusunan APBDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bajuin	Belum terisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu sesuai standar ideal dan SOTK Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, namun tersedia 14 orang ASN
		Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bajuin masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan jaringan internet dan peralatan penunjang lainnya	Kurangannya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	
		Masih kurangnya kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik	Kurangannya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Produk dan Layanan

Pelayanan yang diselenggarakan pada Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan mekanisme prosedur pelayanan, di antaranya :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

E. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut, yaitu :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

- BAB I** Pendahuluan berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- A. Latar Belakang
 - B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
 - C. Isu Startegis
 - D. Produk dan Layanan
 - E. Sistematika Penyajian
- BAB II** Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- A. Visi RPJMD
 - B. Misi RPJMD
 - C. Tujuan dan Sasaran Strategis
 - D. Indikator Kinerja Utama
 - E. Perjanjian Kinerja
 - F. Program dan Kegiatan
- BAB III** Akuntabilitas kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon III (Kepala Kantor/Camat) A
 - 1). Eselon IV (kepala Seksi) A.1
 3. Eselon III (sekretaris Camat) B
 - 1). Esselon IV (Kasubbag) B.1

B. Akuntabilitas Keuangan

menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

1. Anggaran dan realisasi APBD 2021
2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program
3. Perbandingan Program dan kegiatan Tahun 2020 dan 2021

BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- a. Kesimpulan
- b. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. *Cascading* / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1 - 4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA,
RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagaiberikut:

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan

Berkarya

di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.



Inovasi

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.



Tertata

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.



Relegius

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.



Aktual

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara

lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Sinergi

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah “**DESA DIBINA, KOTA DITATA**”. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah “**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**”.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” melalui “*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*”. Fokus pada lokus “*DESA DIBINA, KOTA DITATA*” adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

B. Misi

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

- BERKARYA** : diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut
- INOVASI** : diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
- TERTATA** : diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- RELIGIUS** : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat
- AKTUAL dan SINERGI** : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Bajuin beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan.
2. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bajuin adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan.
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 6 . Sasaran strategis, indikator dan target Kecamatan Bajuin Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	87
2.	Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Kecamatan	81
3.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bajuin Tahun 2019 – 2023 (target 5 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang "**BERINTERAKSI**" (*Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi*)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.	IKM	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	83	85	87	88	89
2.	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib	100 %	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Nilai SAKIP	72 (BB)	75 (BB)	81(A)	82(A)	83(A)
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100 %	100 %	100 %

D. Indikator Kinerja utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Bajuin menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Bajuin.

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung-Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Hasil survey (87)	Semua kasi di kecamatan

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/ kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/ proyeksi kedepan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bajuin Tahun 2021 yang telah disepakati baik oleh camat, Pejabat Esselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Camat, Eselon III dan Eselon IV Kecamatan Bajuin Tahun 2021.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5
Camat : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	87	6 Program / 11 Kegiatan	Rp. 3.031.937.006
Kasi Tata Pemerintahan : 1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD 2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD 3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan 4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik 2. Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD 3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat 4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	9 Desa 9 Desa 9 Desa 1 Kegiatan	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 80.765.480,-
Kasi PMD : 1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi 2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat 3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa 4. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial 5. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya 2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik 3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik 4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP 5. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	9 kelompok 9 dokumen 9 Desa 10 Dokumen 1 Kegiatan	1 Program / 2 Kegiatan	Rp. 93.492.960,-

1	2	3	4	5
Kasi Kemasyarakatan : 1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan 2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan 3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan 2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP 3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	1 Kelompok 6 Kegiatan 747 KK	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 581.599.300,-
Kasi Trantib : 1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan 2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban 3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan 4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi 2. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif 3. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring 4. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 Kejadian 9 Kelompok 3 Kejadian 1 Kegiatan	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 9.429.790,-
Kasi Pelayanan : 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan	1 Program / 1 Kegiatan	Rp. 6.749.610,-

1	2	3	4	5
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat 3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi 3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2 Pengaduan 1 Dokumen		
Sekcam : 1. Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan 2. Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	1. Nilai SAKIP Kecamatan 2. Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	81 100 %	1 Program / 6 Kegiatan	Rp. 3.031.937.006,-
Kasubbag Umpeg : 1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor 3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik 2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik 3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	100% 367 Unit 13 Orang	1 Program / 4 Kegiatan	Rp. 581.029.904,-
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : 1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan 2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen 4 Dokumen	1 Program / 2 Kegiatan	Rp. 2.450.907.102,-

F. Program dan Kegiatan

Tabel 10. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan/Sub Keg.	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	630.270.538	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.957.070
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.361.228
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.952.240
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	Kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	6.234.140	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.749.610	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.610
		Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum	9.429.790	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	9.429.790

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.765.480
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	180.226.380	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	99.460.900
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.343.200	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.160.000

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.183.200
JUMLAH			908.284.738		908.284.738

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan laporan kinerja ketiga Renstra 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Tabel 11. Pengelompokan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I.	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II.	Di atas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III.	Di atas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV.	Di atas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V.	Di atas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI.	Kurang dari 50 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2021 terhadap target sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Bajuin Tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	87	83,64	96,13%
2.	Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Kecamatan	81	76,80	94,81%
3.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100%	100%

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 180 lembar kuisisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi /Kemampuan Pelaksana Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2021 adalah 83,64 dari target 87, dengan nilai capaian sebesar 96,13% berdasarkan Tabel 11. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Bajuin Tahun 2021 termasuk kategori **Sangat Memuaskan**.

Nilai capaian IKU tahun 2021 (96,13 % dari target) bila dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2020 (95,69 % dari target) memang mengalami peningkatan sebesar 0,44 %, dan dari sudut realisasi IKM juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 realisasi IKM sebesar 81,34 (Mutu Pelayanan A) dari target 85, sementara pada Tahun 2021 realisasi IKM sebesar 83,64 (Mutu Pelayanan A) dari target 87, ada peningkatan realisasi IKM sebesar 2,3. Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 13. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,10	9.61
2.	Prosedur	3.13	9.68
3.	Waktu Pelayanan	3.23	9.97
4.	Biaya / Tarif	3.51	9,73
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.18	9.83
6.	Kompetensi Pelayanan	3,19	9,84
7.	Perilaku Pelaksana	3.29	9.12
8.	Maklumat Pelayanan	3.30	9,15
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.39	9.41

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (3,51) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-rata(NRR) terendah adalah unsur persyaratan (3,10). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif, sedangkan pada Persyaratan dan Kompetensi Pelaksana memberikan tingkat kepuasan paling rendah, hal ini disebabkan berkas persyaratan yang disampaikan tidak lengkap sehingga tidak bisa diselesaikan secara cepat dan tepat waktu.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Bajuin menetapkan target nilai IKM sebesar 87, sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2021 diperoleh realisasi nilai IKM 83,64 (Mutu Pelayanan Sangat Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan nilai IKM sebesar 3,36 dari target yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi Kecamatan Bajuin dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur persyaratan dan Kompetensi Pelaksana. Berdasarkan analisa hal ini terjadi karena ada beberapa dokumen pelayanan yang menuntut persyaratan yang bagi masyarakat masih cukup memberatkan. Selain itu penyampaian informasi persyaratan baik dari dinas/instansi pemangku ke Pelayanan di kecamatan sampai pada petugas di desa terlambat atau tidak tersampaikan dengan baik/tepat waktu. Hal ini terjadi akibat sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan terkendala terutama masalah jaringan internet dan kualitas petugas pelayanan.

Kualitas layanan jaringan internet yang kurang bagus di kecamatan Bajuin, terutama untuk pembuatan kartu keluarga (KK) dan pembuatan E-KTP tidak bisa langsung dilayani di kantor kecamatan Bajuin. Ini menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat selaku pemohon kurang mendapatkan pelayanan dengan maksimal, dimana mereka beranggapan bahwa semua pembuatan E KTP dan kartu keluarga (KK) yang di berikan langsung di kecamatan Bajuin kurang prima. Adapun solusi yang di ambil untuk mengatasi permasalahan ini kedepannya dengan mengadakan pemeliharaan dan penambahan kecepatan kualitas jaringan internet dan perlu memberikan penghargaan terhadap petugas yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan.

Pada Tahun 2021 (Tahun Ke-3) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Bajuin menetapkan 2(dua) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan.***

Aktualisasi ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Bajuin adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan daya saing.

Kebijakan mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan public serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan Visi "*Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual ,Sinergi*" dan Misi "*Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya*" dituangkan dalam tabel 14 berikut :

Tabel 14. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bajuin

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1). Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait. 2). memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi. 3). Memberdayakan aparat kecamatan Desa/ Kelurahan. 4). Menyederhanakan dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1). Melakukan koordinasi yang intensif. 2). Mengikut sertakan aparatur dalam diklat-diklat. 3). Memberikan pemahaman kepada aparat desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal/non formal. 4). Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik.
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bajuin yang akuntabel.	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bajuin yang akuntabel.	Meningkatkan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.	Melaksanakan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.

2. Eselon III (Camat)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2021 mencapai 95,69% dari target sebesar 87 dengan point realisasi IKM 83,64. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	87	83,64	96,13%

Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan Bajuin dari tahun 2019-2021 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 16. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021				
		2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	77,89	81,34	87	83,64	96,13%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1) Perbandingan Realisasi dengan Target;

Pencapaian realisasi dari target tahun 2021 sebesar 96,13% terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2020 ke 2021, persentase capaian juga meningkat. Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Bajuin. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 81,34 menjadi 83,64;
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 sebesar 96,13% dibandingkan tahun 2020 sebesar 95,69% terjadi peningkatan. Namun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 terhadap target, capaian kinerja 2021 belum bisa melampaui yang capaian tahun 2018 yang mencapai 100%.
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kecamatan Bajuin tahun 2022 sebesar 88, maka realisasi 2021 sudah mencapai 95,04% dari target;

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pelayanan terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan umum tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terjadi kenaikan penilaian. Kenaikan penilaian terutama pada unsur biaya/tarif pelayanan hal ini dikarenakan tidak adanya tarif/biaya dalam pelayanan, bahkan tidak ada pungutan liar dari petugas dalam proses pelayanan sehingga tingkat kepuasan paling tinggi berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur Biaya/Tarif.

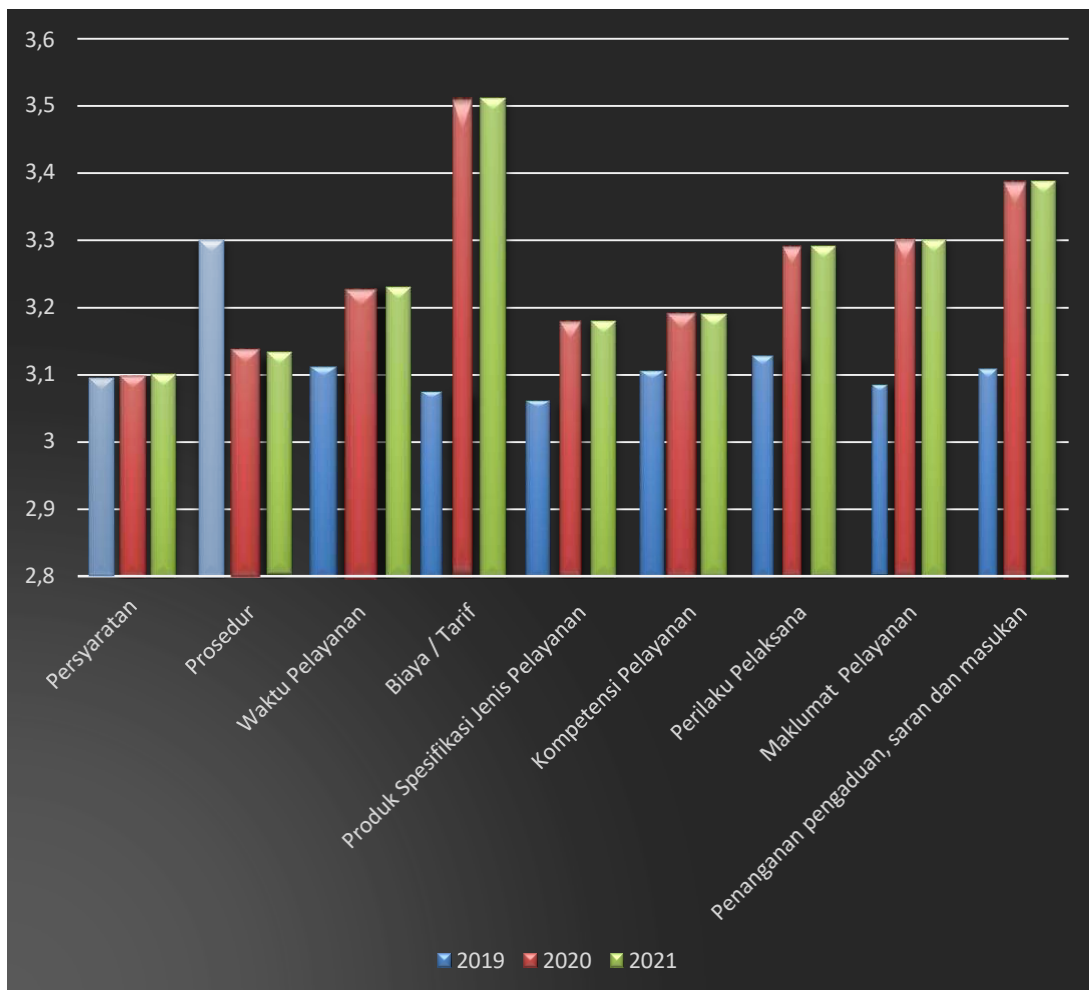
Terjadinya peningkatan nilai IKM tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 di tunjang dari kesiapan pelayanan publik di Kecamatan Bajuin. Baik dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian sangat diharapkan kinerja pelayanan harus mengalami peningkatan setiap tahunnya demi mencapai pelayanan prima.

Ketentuan biaya tarif layanan dihapuskan / gratis pada beberapa pelayanan seperti pengolahan KTP, KK, Akte kelahiran, Kartu Identitas Anak dan lain-lain menyebabkan salah satu unsur yang paling tinggi tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2021.

Nilai terendah ada pada unsur persyaratan dan kompetensi pelaksana. ini disebabkan berkas persyaratan yang disampaikan tidak lengkap sehingga tidak bisa diselesaikan secara cepat dan tepat waktu.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik 2 mengenai Nilai rata-rata unsur pelayanan pada kecamatan Bajuin tahun 2019 – 2021 berikut ini.

Grafik 1. Nilai Rata-Rata (NRR) Unsur-Unsur Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2021



4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kecamatan Bajuin di dukung oleh Program / kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 908.284.738.-. dan realisasi sebesar Rp.710.544.784.- atau 78,23%. Realisasi tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2020 dikarenakan kendala wabah virus Covid-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17 berikut ;

Tabel 17. Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	630.270.538.-	542.569.134.-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	6.234.140.-	4.428.200.-
3.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.749.610.-	5.324.600.-
4.	Program Koordinasi dan Fasilitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.429.790.-	8.602.500.-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	180.226.380.-	106.920.900.-
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.343.200.-	26.362.050.-
7.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880,-	16.357.400.-
JUMLAH		908.284.738.-	710.544.784.-

3. Eselon III (Sekretaris)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kecamatan Bajuin Tahun 2021 untuk persentase pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dapat terealisasi penuh 100%. Sedangkan capaian realisasi Target Nilai Sakip Tahun 2021 masih dalam proses penilaian. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 18 berikut.

Tabel 18. Sasaran Strategis, indikator, target, realisasi dan capaian Sekretariat Kecamatan Bajuin Tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan	Nilai SAKIP Kecamatan	81	76,80	94,81,%
2.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100%	100%

Adapun realisasi capaian target terhadap peningkatan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan (Nilai SAKIP Kecamatan) dan peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian (Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib) yang ada di kecamatan Bajuin dari tahun 2019-2021 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

Tabel 19. Realisasi, Target dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Bajuin

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP Kecamatan	67,78	81,38	81	76,80	94,81%
2	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi Target nilai SAKIP tahun 2019 sebesar 67,78 (B) sedangkan capaian realisasi target tahun 2020 sebesar sebesar 81,38 (A) atau dengan kata lain realisasi target mencapai 113,028%, dari Target 72 dengan nilai komponen perencanaan kinerja 28,3 point pengukuran kinerja 19,38 point pelaporan kinerja 10,15 point evaluasi internal 6,55 point dan pencapaian kinerja 17 point. Realisasi 2019 melampaui target, sedangkan untuk tahun 2021 realisasi mencapai 94,81 % dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 20 berikut.

Tabel 20. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Bajuin Tahun 2019-2021 berdasarkan komponen penilaian

No	Komponen Penilaian	Nilai			Ket.
		2019	2020	2021	
1.	perencanaan kinerja	24,61	28,3	28,95	
2.	pengukuran kinerja	14,38	19,38	22,19	
3.	pelaporan kinerja	9,62	10,15	10,88	
4.	evaluasi internal	4,64	6,55	3,04	
5.	pencapaian kinerja	14,54	17	11,75	
Jumlah		67,78	81,38	76,80	

Sumber data : Rekap Hasil Evaluasi SAKIP Kab. Tanah Laut Tahun 2019 -2021

Peningkatan nilai SAKIP 2020 dibandingkan tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terutama pada komponen penilaian Perencanaan kinerja (3,69 point) dan pengukuran kinerja (5 point), dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 28,3 point menjadi 28,95 point . Untuk pengukuran kinerja terjadi peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib di lingkungan Kantor Kecamatan Bajuin dapat terpenuhi seluruh target (100%) baik dalam hal keperluan kepegawaian dan administrasi umum.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

- a. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 untuk Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sama 100%; Realisasi Indikator Nilai SAKIP tahun 2020 sebesar 81,38 sedangkan tahun 2021 sebesar 76,80 .
- b. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya ada penurunan realisasi dan capaian kinerja sebesar 4,58 point namun capaian kinerja Kecamatan Bajuin tahun 2021 dengan kategori BB (sangat baik).
- c. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tahun 2022 optimis dapat tercapai dengan melihat hasil realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 21. Realisasi Capaian SAKIP Kecamatan Bajuin Tahun 2020 Dan Persentase Capaian Kinerja Terhadap Target SAKIP Tahun 2021.

No.	Jenis Data	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		Kinerja Tahun 2021 (%)	
				Target	Realisasi	Terhadap Capaian Tahun 2020	Terhadap Target Tahun 2021
1.	SAKIP	Nilai	81,38	81,00	76,80	108,51	94,81
2.	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	%	100	100	100	100	100

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Bajuin. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada, koordinasi yang baik dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Nilai SAKIP dan Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib Kantor Kecamatan Bajuin di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 630.270.538.- dan realisasi sebesar Rp.542.569.134.- atau 86 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 22 berikut ;

Tabel 22. Realisasi Program Penunjang pada Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	630.270.538.-	542.569.134.-

4. Eselon IV (Kepala Subbagian/Seksi)

Kecamatan Bajuin sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Bajuin. Ada 6 (enam) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Bajuin. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Bajuin sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tabel 23. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1 Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	9 Desa	9 Desa	100%
2 Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	9 Desa	9 Desa	100%
3 Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan	Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	9 Desa	9 Desa	100%
4 Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

Realisasi capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan kecamatan Bajuin terhadap target mencapai 100% . Terfasilitasinya semua desa baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan BPD melalui pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan di Desa serta penyampaian regulasi peraturan perundang-undangan terkait kegiatan Kasi Pemerintahan Desa bersama dinas/instansi yang berwenang.

Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan melalui pelaksanaan Upacara HUT RI ke-75 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kecamatan Bajuin dengan menerapkan protokol kesehatan COVID19 yang dilanjutkan dengan mengikuti pelaksanaan Upacara di tingkat Kabupaten secara virtual, namun dikarenakan masih meningkatnya wabah virus COVID-19 Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga realisasi anggaran kegiatan tersebut hanya Rp. 20.732.400, hanya 25,67 % dari Rp. 80.765.480 sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran Kantor Kecamatan Bajuin.

Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu/Pilkada, Pilkades, penjarangan aparat desa dan BPD selama tahun 2021 telah terlaksana di 9 (sembilan) desa. Adapun rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemilu kepala desa (pilkades) sebanyak 1 (satu) desa yaitu Desa Sungai Bakar dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kuyit;
2. Penjaringan aparatur desa sebanyak 4 (empat) desa yaitu Desa Tirtajaya, Ketapang, Tanjung, dan Bajuin.
3. Penjaringan Anggota BPD dilaksanakan secara serentak diseluruh desa lingkup kecamatan Bajuin.



Gambar 3. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Kuyit Periode 2021-2023

Sedangkan Pembinaan dan monitoring penyusunan laporan kependudukan juga terlaksana pada 9 (sembilan) desa melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat se kecamatan Bajuin terkait perubahan data kependudukan, pindah domisili dan pembuatan akte kependudukan.



Gambar 4. Penyerahan Surat Suara dari Dinas PMD Kab. Tanah Laut ke Kantor Kecamatan Bajuin untuk Pemilihan Kepala Desa Sungai Bakar didampingi pihak POLRI dan TNI.



Gambar 5. Pelaksanaan HUT RI 17 Agustus 2021 di Kantor Kecamatan Bajuin, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa kecamatan Bajuin terhadap target mencapai 100% kecuali realisasi capaian jumlah pelayanan administrasi Izin mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP mencapai 6 dokumen atau 60% dari target 10 Dokumen dan realisasi fasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi terealisasi 3 kelompok (33,33%) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 24 berikut

Tabel 24. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1 Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	9 kelompok	3 Kelompok	33,33%
2 Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat	Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	9 desa	9 desa	100%
3 Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	9 desa	9 desa	100%
4 Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	10 dokumen	6 Dokumen	60%
5 Fasilitasi kegiatan Musrebang Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil produksi direncanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-56, namun tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan penerapan protokol kesehatan COVID19. Kegiatan promosi kelompok “Berkah” Desa Bajuin yang bergerak dalam usaha pembuatan kain sasirangan tetap berjalan sampai dengan sekarang. Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli.

Kegiatan promosi “BUMDES Desa Tirtajaya” pemasaran produksi Jahe Instan mulai produksi dan promosi langsung kepada konsumen, begitu juga kegiatan pemasaran produksi Jahe Instan dan usaha pembuatan kain sasirangan Desa Kuyit sudah produksi dan promosi langsung kepada konsumen.

Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa dilaksanakan pada 9 (sembilan) desa. Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.



Gambar 6. Evaluasi Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2021 Desa se Kecamatan Bajuin yang difasilitasi oleh Tim APBDes Kecamatan Bajuin



Gambar 7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa se Kecamatan Bajuin dari Dinas PMD. Kab. Tanah Laut beserta Tim Pendamping Desa dan Kejaksaan RI



Gambar 8 . Edukasi Perpajakan Bendahara Desa yang difasilitasi oleh Kecamatan Bajuin bersama KP2KP Pelaihari

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Bajuin dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 %.

Untuk Meningkatkan wawasan pengelola keuangan desa terutama Bendahara Desa dalam hal perpajakan telah dilaksanakan edukasi perpajakan bagi bendahara desa se-Kecamatan Bajuin yang difasilitasi oleh kecamatan Bajuin bersama KP2KP Pelaihari yang dilaksanakan di Aula kecamatan Bajuin. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa se- kecamatan Bajuin bersama Dinas PMD Kabupaten tanah Laut dan Kejaksaan RI.

Pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan oleh 9 desa yang ada dilingkup kecamatan Bajuin dan dilanjutkan dengan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan menghadirkan utusan desa, Pendamping Desa dan kecamatan serta instansi terkait.



Gambar 9. Pelaksanaan Musrenbang Desa Bajuin Kecamatan Bajuin dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2022

Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-56 dibulan Desember dilaksanakan lomba Kebersihan Kantor Desa Se-Kecamatan Bajuin. Aspek penilaian lomba meliputi aspek kebersihan gedung kantor, Aspek kerapian dan aspek kenyamanan dan estetika. Adapun Pemenang lomba kebersihan Kantor Desa yaitu Juara 1 Desa Tanjung, Juara II Desa Tirtajaya dan Juara III desa Galam . Kegiatan ini diselenggarakan dan difasilitasi oleh Kecamatan Bajuin bersama pendamping Desa dan Bank Kalsel Cabang Pembantu Pelaihari.



Gambar10. Penyerahan Hadiah Pemenang Lomba Kebersihan Kantor Desa Se-Kecamatan Bajuin Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut Ke-56 Tahun 2021 Pada Saat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Lingkup Kecamatan Bajuin Di Aula Kantor Kecamatan Bajuin Tanggal 04 Januari 2022

3. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 25. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan Ta. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1 Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 Kelompok	1 Kelompok	100%
2 Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	6 kegiatan	6 kegiatan	100%
3 Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	747 KK	2.317 KK	310%

Kegiatan pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan di kecamatan Bajuin yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Bajuin. Fasilitas dan pembinaan terutama dalam dalam rangka mempersiapkan kontingen Kecamatan Bajuin untuk lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada 26 Februari- 28 Februari Tahun 2021 di Kecamatan Takisung.

Fasilitas kegiatan dibidang sosial keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan yang di targetkan 6 kegiatan dapat terlaksana sehingga mencapai 100%, 6 kegiatan tersebut yaitu :

1. Majelis Dzikir dan Sholawat Jalsatur Rasul Riyadhul jannah Desa Kunyit kegiatan “Pelaksanaan Dzikir dan Sholawat Haul Akbar Al-Faqih Muqaddam”,
2. Karang Taruna Laskar Pemuda Desa Tanjung kegiatan “Pelaksanaan TABLIG Akbar”,
3. Maulid Habsyi Fifayatul Ghulam Desa Bajuin kegiatan “Pelaksanaan TABLIG Akbar dan Dzikir”,
4. Ikatan Remaja Masjid Darul Amilin Desa Ketapang kegiatan “Pelaksanaan Festival Maulid Habsyi dan TABLIG Akbar”,

5. Karang Taruna Taruna Bhakti Desa Tirtajaya kegiatan “Pelaksanaan Festival Nasyid dan TABLIG Akbar”, dan
6. Maulid Habsyi At-Taubah Putra Desa Pemalongan kegiatan “Pelaksanaan TABLIG Akbar Sholawat dan Dzikir”.

Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan bajuin melampaui target 747 KK menjadi 2.657 KK. Adapun rincian bantuan sosial yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 26 berikut :

Tabel 26. Jenis Bantuan Sosial dan Jumlah Penerima Bantuan Kecamatan Bajuin Ta. 2021

No.	Jenis Bantuan Sosial	Jumlah Penerima
1.	Bantuan sosial tunai (BST) dari Kemensos	556 KK
2.	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	507 KK
3.	Program Keluarga Harapan (PKH)	193 KK
4.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBN	562 KK
5.	Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa	839 KK
JUMLAH		2.657 KK

Sumberdata : Laporan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bajuin Tahun 2021

Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan di kantor kecamatan, kantor desa dan ada yang melalui perbankan seperti BRI dan ada juga melalui Kantor POS Indonesia. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati H. Sukamta untuk 2 (lima) desa di kecamatan Bajuin yaitu desa Galam dan Desa Tanjung pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang bersama Camat Bajuin dan forum koordinasi pimpinan kecamatan Bajuin.



Gambar 11. Penyerahan Simbolis Sertifikat PTSL dirangkaikan penyerahan BLT Dana Desa pada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang di Desa Galam pada tanggal 23 April 2021



Gambar 12. Penyaluran BLT Dana Desa Pemalongan

Selain tersebut diatas, untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3Kg untuk masyarakat Kecamatan Bajuin, bersama seluruh Kepala Desa Kecamatan Bajuin mengadakan musyawarah Desa untuk penetapan Daftar Sementara Pengguna Gas LPG 3Kg Bersubsidi.



Gambar 13. Musdes penetapan daftar sementara pengguna LPG 3 kg bersubsidi di Desa Tanjung kec. Bajuin pada tanggal 20 Mei 2021



Gambar 14. Musdes penetapan daftar sementara pengguna LPG 3 kg bersubsidi di Desa Pemalangan

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 27. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan KetertibanTa. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1 Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 Kejadian	1 Kejadian	100%
2 Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	9 kelompok	9 kelompok	100%
3 Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	3 kejadian	3 kejadian	100%
4 Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

Fasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dikecamatan Bajuin yaitu memfasilitasi permasalahan pembagian hasil pendulangan emas yang tidak sesuai, keributan memuncak setelah salah satu warga melakukan aksi pembakaran 3 unit sepeda motor. Hasil fasilitasi diperoleh kesepakatan damai antara kedua belah pihak.

Pembinaan kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban yang aktif melalui kelompok perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada di 9 (sembilan) desa yang ada di kecamatan Bajuin.

Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring selama tahun 2021 terealisasi 3 penanganan yaitu;

1. Patroli bersama dengan Satpol PP, Polsek dan Danramil kecamatan Bajuintentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 ke tempat kerumunan masyarakat desa seperti warung, poskamling dan pasar. Menegur dan

- membubarkan kerumunan serta mensosialisasikan prokes COVID 19 dan membagikan Masker kepada warga yang kedapatan tidak menggunakan masker.
2. Memfasilitasi permasalahan masyarakat Dusun Riam Pinang mengenai penolakan/keberatan terhadap keberadaan salah satu warga di wilayah Desa Tanjung khususnya di Dusun VI Riam Pinang.
 3. Memfasilitasi pengaduan masyarakat Desa Tebing Siring terkait pembebasan lahan yang semula merupakan kawasan hutan lindung kemudian diberikan kepada masyarakat.

Untuk terciptanya masyarakat Kecamatan Bajuin bebas dari narkoba dan menambah wawasan masyarakat Kecamatan Bajuin tentang bahaya narkoba, Kecamatan Bajuin melaksanakan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum tentang narkoba pada masyarakat Kecamatan Bajuin bersama BNN Tanah Laut, Kepolisian, dan TNI pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan peserta seluruh Kepala Desa di Kecamatan Bajuin, pelajar dan aparat Desa di wilayah Kecamatan Bajuin.



Gambar 15. Sosialisasi Penyuluhan Hukum tentang Narkoba pada Masyarakat Kecamatan Bajuin Tahun tanggal 12 Oktober 2021

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Kecamatan Bajuin melalui kasi trantib memfasilitasi Pelaksanaan rapat Koordinasi kerukunan antar umat beragama bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut bertempat di aula Kecamatan Bajuin di hadiri oleh pemuka atau tokoh agama yang ada di kecamatan Bajuin.



Gambar 16. Rapat Koordinasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut Tingkat Kecamatan Bajuin Di Aula Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2021

5. Kepala Seksi Pelayanan

Tabel 28. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan Ta. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1 Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100%
2 Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	2 Pengaduan	2 Pengaduan	250%
3 Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bajuin Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bajuin Tahun 2021 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bajuin pada Tahun 2021 memperoleh IKM sebesar 83,64 dengan mutu pelayanan ber kategori Sangat Baik.

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2020 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi sepenuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan pengambilan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pengambilan KK (Kartu Keluarga)
5. Pelayanan pengambilan kartu identitas anak (KIA).
6. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
9. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.

10. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
11. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
15. Pelayanan Akta Kelahiran
16. Pelayanan Surat keterangan lain-lain.

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Bajuin.

Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 15 jenis pelayanan telah memenuhi target indikator tahun 2021 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bajuin. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 28 berikut:

Tabel 29. Realisasi Pelayanan Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Ket.
1	Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal	6	Seksi PMD
2	Pelayanan pembuatan Rekomendasi	1	Seksi Pelayanan
3	Pelayanan KTP Elektronik/Manual.	702	Seksi tapem
4	Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	566	Seksi tapem
5	Pelayanan kartu identitas anak (KIA)	227	Seksi Tapem
6	Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	46	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK	2	Seksi pelayanan
8	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU)	10	Seksi pelayanan
9	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili	16	Seksi pelayanan
10	Pelayanan Surat Keterangan Pindah	57	Seksi pelayanan
11	Pelayanan Surat Keterangan Kematian.	56	Seksi pelayanan
12	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	31	Seksi pelayanan
13	Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian	-	Seksi Trantib
14	Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah	13	Seksi Tapem
15	Pelayanan Surat Keterangan lainnya	5	Seksi pelayanan
16.	Pelayanan Akta Kelahiran	304	Seksi Tapem

Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi yaitu ada 3 (tiga) yang ditindak lanjuti oleh Seksi Trantib sebagaimana sudah dijelaskan pada kegiatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada halaman 66 - 67. Dengan demikian realisasi target mencapai 100 %.

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Bajuin Tahun 2021 dengan nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 83,64 dari 180 responden yang mengisi kuisioner.

Pelayanan surat ijin keramaian tidak ada realisasi, di karenakan penerapan protokol kesehatan COVID19 yang tidak mengijinkan adanya kerumunan/ berkumpulnya massa/orang pada suatu tempat yang akan berdampak pada peningkatan penyebaran COVID19. Walaupun demikian masih ada warga yang datang mengurus ijin keramaian namun ditolak dengan alasan tersebut diatas.



Gambar 17. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 30. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Ta. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1 Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	13 orang	14 orang	107%
2 Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	367 unit	367 unit	100%
3 Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	13 Orang	14 orang	107%

Jumlah pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Bajuin sebanyak 22 (dua Puluh dua) orang yaitu 14 (empat belas) orang ASN dan 8 (delapan) orang PTT. Semua kebutuhan administrasi perkantoran terlayani dengan baik. Realisasi Target indikator kinerja mencapai 100%.

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dengan baik dan memadai sebagai sarana dan penunjang kegiatan sebanyak 367 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang dalam kondisi baik (tabel 14. Halaman 18).

Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2021 sebanyak 14 (empat belas) ASN. Administrasi kepegawaian saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPeg yang memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian yang diminta.

Pada Tahun 2021 Jumlah pegawai kenaikan pangkat sebanyak 1 orang. Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2021 sudah dilaksanakan penilaian oleh pimpinan sesuai tingkatannya dan ASN Lingkup kecamatan Bajuin tidak ada yang memiliki nilai rata-rata kurang atau sangat kurang.



Gambar 18. Apel Pagi Karyawan di Halaman Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan SOTK Kecamatan Bajuin yang terdiri dari Camat, Sekretaris, 2 Kasubag dan 5 Kasi serta jabatan JFU 25 orang dan 6 JFT. Namun jumlah Sumber Daya Manusia terkait yang menunjang pencapaian kinerja di Kecamatan Bajuin tahun 2021 hanya ada 14 ASN dan 8 PTT termasuk Penjaga dan petugas kebersihan.

Sangat diharapkan kedepannya Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan fungsional tertentu (pranata Komputer) dapat terpenuhi agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Karena sebagian besar kepala seksi tidak memiliki JFU, maka pelaksanaan kegiatan di seksi di tangani sendiri oleh kepala seksi. Hal ini sangat berpengaruh pada realisasi pelayanan.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemenuhan SDM, Kecamatan Bajuin sudah berupaya meminta formasi jabatan yang kosong baik JFU ataupun JFT ke BKPSDM sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kompetensi SDM ASN kantor Kecamatan Bajuin setiap tahunnya memberikan penghargaan/*reward* kepada ASN Teladan, melalui rapat tim Penilai ditentukanlah 1 ASN yang dinilai layak mendapatkan penghargaan/*reward* tersebut.



Gambar 19. Penyerahan Penghargaan kepada ASN Teladan Kantor Kecamatan Bajuin Tahun 2021.

7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 31 Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Ta. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1 Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen	6 Dokumen	200 %
2 Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Dokumen Renja Perubahan 2021, Dokumen DPA-Perubahan 2021, Penetapan Kinerja 2021, Dokumen Renja 2022, RKA 2022 dan DPA 2022. Dengan demikian realisasi capaian target melampaui target (200%).



Gambar 20. Sosialisasi Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD TA 2021

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2021, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2021, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2021 dan Laporan Keuangan semesteran dan pronogsis 2021. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%.



Gambar 21. Kegiatan Asistensi RKA-DPA Perubahan Kecamatan Bajuin Tahun 2021

Untuk terciptanya pencapaian kinerja yang baik, kantor Kecamatan Bajuin setiap bulannya melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan perbulan, dalam rapat tersebut Camat beserta jajaran mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, dan menyiapkan rencana untuk kegiatan selanjutnya.



Gambar 22. Rapat Internal Kantor Kecamatan Bajuin terkait evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2021 untuk eselon IV mencapai 110,63%. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2020-2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 32.

Tabel 32. Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV Kecamatan Bajuin tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100
2	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100
3	Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100
4	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	1 kelompok	9 kelompok	3 kelompok	33,33
6	Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	100
7	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	9 Desa	9 Desa	9 Desa	100
8	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	9 Dokumen	10 dokumen	6 dokumen	60
9	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
10	Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	100
11	Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	1 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100
12	Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	2317 KK	747 KK	2.657 KK	355
13	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 Kejadian	1 Kejadian	1 Kejadian	100
14	Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	100
15	Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	5 Kejadian	3 Kejadian	3 Kejadian	100

Lanjutan ...

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
16	Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
17	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	15 Jenis Pelayanan	100
18	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	2 Pengaduan	2 Pengaduan	2 Pengaduan	100
19	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
20	Jumlah ASN yang administrasi perkantoranannya terlayani dengan baik	100%	100%	100%	100
21	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	367 unit	367 unit	367 unit	100
22	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	13 Orang	13 Orang	14 orang	107
23	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	200
24	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Rata-Rata Capaian					110,63

1) Perbandingan realisasi dengan target;

Dari hasil realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 ada beberapa capaian yang menurun yaitu Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP pada tahun 2020 sebanyak 9 dokumen sedangkan tahun 2021 sebanyak 6 dokumen. Penurunan capaian pada kegiatan tersebut dikarenakan adanya arahan dari Pemerintah Pusat untuk tidak melakukan penarikan/pemungutan IMB non komersil sambil menunggu adanya Peraturan dari Pemerintah Pusat terkait ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil.

Sebaliknya realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2021 melampaui target seperti Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial (355%), Jumlah dokumen administrasi kepegawaian (107%), Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (200%).

Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial meningkat menjadi 2.657 KK dibandingkan tahun 2021 sebanyak 2317 KK akibat kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam menangani dampak COVID 19. Bantuan langsung Tunai di berikan kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat miskin dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid- 19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat.

Capaian kinerja sasaran berdasarkan rata-rata capaian sebesar 110,63 % meningkat dibandingkan tahun 2020 mencapai 108,36%. Walaupun masih ada kegiatan yang capaian kinerja terhadap realisasi target rendah karena sebagian besar Realisasi tidak tercapai akibat tidak bisa dilaksanakannya kegiatan akibat dampak COVID 19. Walaupun demikian pencapaian di beberapa kegiatan yang melampaui target mampu mendongkrak pencapaian target rata-rata.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait;

Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 untuk kinerja eselon IV mengalami kenaikan dari 108,36% menjadi 110,63% di karenakan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan prosedur kesehatan penanganan COVID19.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Penurunan capaian kinerja pada indikator kinerja Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya (33,33%) dikarenakan tidak terealisasinya kegiatan Pameran Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut. Pameran ekspo hari jadi kabupaten Tanah Laut selama ini jadi ajang promosi. Dengan tidak terlaksananya kegiatan tersebut mengakibatkan fasilitasi pihak kecamatan tidak mencapai target 9 kelompok.

Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP (100%) dari target 6 kegiatan seluruhnya dapat terlaksana dengan baik, dibandingkan dengan tahun 2020 hanya 1 kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Menurunnya capaian kinerja bukan dikarenakan menurunnya kinerja ASN lingkup Kecamatan Bajuin, namun lebih pada akibat Dampak COVID19. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan **COVID-19** sebagai **bencana nasional**. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan **Bencana** Non-Alam Penyebaran **CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)** Sebagai **Bencana Nasional**, meskipun pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih menjadi kendala, ASN Kantor Kecamatan Bajuin tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Bajuin tahun 2021 melekat pada sebagian indikator sasaran yang ditetapkan kurang spesifik dari segi dokumen perencanaan. Sedangkan dari segi pengukuran kinerja diperlukan monitoring secara berkala terhadap dokumen perjanjian kinerja dan dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang. Memaksimalkan informasi dan data kinerja untuk dimanfaatkan dalam perbaikan kinerja.

Rencana aksi yang dilakukan untuk perbaikan dalam bentuk langkah- langkah nyata yang telah dilakukan ditahun 2021 antara lain:

1. Mempertajam indikator sasaran dan lebih spesifik dalam dokumen perencanaan tahun 2022 yang diselaraskan dengan pohon kinerja dan renstra 2019-2023 Kecamatan Bajuin;
2. Mengumpulkan data kinerja di masing-masing seksi/sub bagian beserta data dukung dan photo kegiatan;
3. Menyusun informasi dan data kinerja Kecamatan Bajuin dan menyajikannya dalam tabel. Informasi dan data dimanfaatkan untuk perbaikan pelaporankinerja tahun 2021;
4. Merencanakan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi internal melalui rapat koordinasi internal di kecamatan Bajuin secara berkala (setiap bulan/per triwulan). Walaupun belum menyajikan hasil capaian kinerja per triwulan. Namun kedepannya akan diterapkan rapat evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan rencana tindak lanjut terhadap hambatan/kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan;
5. Capaian kinerja di informasikan dalam bentuk narasi, tabel maupun grafik sehingga mampu menggambarkan dan menjelaskan capaian yang telah dicapai sebagaimana di sajikan dalam laporan kinerja (LKj) tahun 2021 ini.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pada tahun 2021 Kantor Kecamatan Bajuin terdiri dari 6 (enam) program 11 (sebelas) kegiatan dan 24 Subkegiatan dengan Pagu murni sebesar Rp. 872.891.304.- menjadi Rp. 908.284.738.- setelah perubahan anggaran. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp. 710.544.784.- dengan capaian sebesar 78,23%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 33. Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Bajuin tahun 2021

No.	Program	Kegiatan/Sub Keg.	Pagu (Rp)	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 318.957.070	Rp. 280.015.523
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 240.361.228	Rp. 201.600.711
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 70.952.240	Rp. 52.066.900
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 8.956.200	Rp. 8.886.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.499.850	Rp. 1.052.100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.957.780	Rp. 1.380.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 2.776.510	Rp. 1.996.100
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp. 6.749.610	Rp. 5.324.600
3.	Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Rp. 9.429.790	Rp. 8.602.500
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	Rp. 80.765.480	Rp. 20.732.400

		Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Rp. 99.460.900	Rp. 86.188.500
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. 14.207.780	Rp. 12.622.400
		Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 12.867.100	Rp. 3.735.000
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 17.160.000	Rp. 5.500.00
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 22.183.200	Rp. 20.862.050
Jumlah			Rp. 908.284.738	Rp. 710.544.784

2. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, kantor kecamatan Bajuin pada tahun 2021 menganggarkan jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp 3.000.000.- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.776.899.266- .

Selanjutnya pada pelaksanaan Anggaran Perubahan anggaran belanja kantor kecamatan Bajuin menjadi Rp. 3.792.312.700.- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 2.988.655.500,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 78,81% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 803.657.200.- (21,19%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 34 berikut:

Tabel 34. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Bajuin Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	PAGU MURNI 2021	PAGU PERUBAHAN 2021	REALISASI (Rp).	(%)
1.	PENDAPATAN	3.000.000	3.000.000	2.332.500	77,75
	A. PENDAPATAN ASLI AERAH (PAD)	3.000.000	3.000.000	2.332.500	77,75
	- Retribusi Daerah	3.000.000	3.000.000	2.332.500	77,75
2.	BELANJA DAERAH	3.776.899.266	3.792.312.700	2.998.655.500	78,81
	A. BELANJA OPERASI	3.673.486.926	3.664.459.710	2.865.075.500	84
	- Belanja Pegawai	2.444.672.962	2.444.672.962	1.820.975.716	74,5
	- Belanja Barang dan Jasa	789.458.964	780.431.748	604.744.784	77,5
	- Belanja Hibah	439.355.000	439.355.000	439.355.000	100
	B. BELANJA MODAL	103.412.340	127.852.990	123.580.000	96,6

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.

Tabel 35. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	630.270.538	542.569.134	86,1%
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja, dan pelaporan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.234.140	4.428.200	71%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.749.610	5.324.600	78 %
		Program Koordinasi dan Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.429.790	8.602.500	91%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	180.226.380	106.920.900	59%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880	16.357.400	60%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.343.200	26.362.050	67%
JUMLAH			908.284.738	710.544.784	78,2%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja yang semua dapat terlaksana dengan baik, realisasi keuangan sebesar 78,2% lebih rendah dari tahun 2020 dikarenakan masih terjadinya bencana pandemi Covid-19, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Persentase keuangan, Fisik dan efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Bajuin Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	% KEUANGAN	% FISIK	% EFISIENSI
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	86,1	100	13,9
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	71	100	29
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	71	98	27

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Pada tahun 2020 jumlah program 8 dan 20 kegiatan dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah program 6 dan 11 kegiatan. Demikian juga dengan jumlah anggaran 2021 untuk belanja langsung sebesar Rp. 908.284.738.- terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2020 jumlah anggaran belanja langsung yaitu sebesar Rp. 525.924.350.-. Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2020 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 37. Perbandingan Program dan Kegiatan Serta Pagu Anggaran Kecamatan Bajuin Tahun 2020-2021

TAHUN 2020		TAHUN 2021	
Nama program	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Penyusunan laporan keuangan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program Koordinasi dan Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat	Pendidikan dan pelatihan kepemudaan		

Program Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	-	-
	Pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raga	-	-
	Pembinaan organisasi perempuan	-	-
	Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan	-	-
Program Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-	-
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-
Program perencanaan pembangunan Kecamatan	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi dan Hasil Produksi	-	-
	Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	-	-
Total		Total	
9	20	6	11
Total Anggaran		Total Anggaran	
Rp525.924.350		Rp908.284.738	

Adapun belanja langsung 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 382.360.388. Belanja Langsung tahun anggaran 2020 mengalami penurunan pagu dikarenakan situasi awal mula bencana pandemi Covid-19, karena hal tersebut terjadilah refocusing anggaran pada tahun 2020. Untuk jumlah pendapatan dari retribusi IMB non komersil pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun 2020, pada tahun 2021 realisasi mencapai Rp. 2.332.500 sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.389.000.

Pada tahun 2020 tidak ada belanja hibah untuk Kecamatan Bajuin, sedangkan untuk tahun 2021 Kecamatan Bajuin memiliki Belanja Hibah untuk 6 organisasi masyarakat Kecamatan Bajuin sebesar Rp. 439.355.000, kemudian untuk Belanja Modal meningkat di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Bajuin Tahun 2020-2021

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp).	
		2020	2021
1.	PENDAPATAN	3.389.000	2.332.500
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.389.000	2.332.500
	<i>Retribusi Daerah</i>	<i>3.389.000</i>	<i>2.332.500</i>
2.	BELANJA	2.138.936.017	2.988.655.500
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.654.233.948	2.260.330.716
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>1.654.233.948</i>	<i>1.820.975.716</i>
	<i>Belanja Hibah</i>		<i>439.355.000</i>
	BELANJA LANGSUNG	484.702.069	728.324.784
	<i>Belanja Hibah</i>	-	-
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>428.008.469</i>	<i>604.744.784</i>
	<i>Belanja Modal</i>	<i>56.693.600</i>	<i>123.580.000</i>

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 merupakan laporan pertanggungjawaban ketiga terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan. Indikator kinerja program yang terdiri dari 3 sasaran dan 24 Indikator kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 110,63 % dengan rincian 22 (Dua Puluh dua) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja **cukup**, dan 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja **kurang**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Kecamatan Bajuin dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Terus meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup SKPD Kecamatan Bajuin;
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Bajuin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Menerapkan perjanjian kinerja dari hingga ke level pelaksana;
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah pola pikir/*mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja atau outcome yang menunjang visi misi Kabupaten;
5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascade down*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai;

-
6. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur;
 7. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Bajuin yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan;
 8. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan;
 9. Membenahi kultur negatif organisasi dengan mengubah pendekatan hirarkis menjadi pendekatan kolaborasi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuka hotline sebagai akses dari masyarakat ke pimpinan, mengevaluasi setiap bulan sekali kinerja atasan, bawahan dan sesama pegawai.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Raya Bajuin No 1 Rt 6 Rw3 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin

KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BAJUIN ,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai implementasi *Good Governance* dalam sistem pemerintahan diperlukan adanya pelaporan pencapaian kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah dan mengukur efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan rencana kinerja tahunan;
 - b. bahwa untuk mengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah maka langkah yang dilakukan adalah dengan membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat Bajuin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Berita Negara Republik Indonesia ;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- b. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim dalam merumuskan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- c. Pengumpulan data yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- d. menelaah dan memahami bahan yang telah disiapkan juga menganalisa data dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut;
- e. mengoreksi dalam penyelesaian pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut;
- f. mendiskusikan dengan Bidang terkait sehubungan pencarian data tambahan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kabupaten Tanah Laut; dan
- g. mengadakan perbaikan atau perubahan sehubungan pemantapan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut.

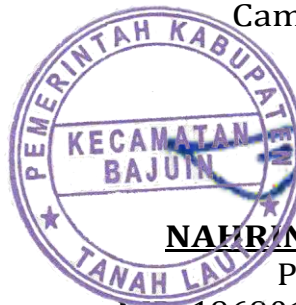
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab dan melaporkan

hasil kegiatan kepada Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bajuin
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Camat Bajuin,



NAHRIN FAUZI, S.Sos

Pembina

NIP. 19690130 199002 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
 DAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN 2022**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris	Ketua
2.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
3.	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota
4.	Kasi Pelayanan	Anggota
5.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
7.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota



Camat Bajuin,

NAHRIN FAUZI, S.Sos

Pembina

NIP. 19690130 199002 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Raya Bajuin No 1 Rt 6 Rw3 Desa Bajuin Kecamatan Bajuin

K E P U T U S A N CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KANTOR KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

CAMAT BAJUIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9).
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT.**

- KESATU : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Kantor Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di : Bajuin
Pada tanggal : 3 Januari 2022.



Pembina
NIP 19680130 199002 1 002

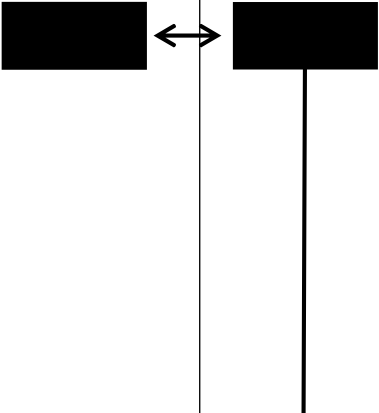
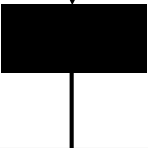
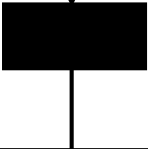
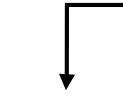
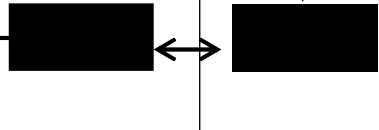




Lampiran : Keputusan Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut
 Nomor : 17 Tahun 2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

A. INFORMASI PROSEDUR

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KANTOR KECAMATAN BAJUIN</p>	Nomor SOP	
	Tgl pembuatan sebelum disahkan	
	Tgl ujicoba	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Dasar Hukum	Pengendalian	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 	<ol style="list-style-type: none"> Tim Penyusunan LAKIP terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf Pendukung Kualifikasi anggota tim penyusunan LAKIP adalah mempunyai kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi Komputer Peningkatan kompetensi tim penyusun LAKIP Hasil penyusunan LAKIP adalah berupa laporan LAKIP SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD 	
Identifikasi Risiko	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan pengetahuan tim penyusun Peraturan yang selalu berubah (dinamis) Tidak lengkapnya data yang diperlukan 		

B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur		Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
		Inspektur	Sekretaris	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun LAKIP SKPD					Draf Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIPSKPD	1 hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun LAKIP SKPD	
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun LAKIP SKPD ke Inspektur					Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIP SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun LAKIP	
3	Penetapan SK Tim Penyusun LAKIP SKPD oleh Inspektur					Draf SK tim Penyusun LAKIPSKPD	1 hari	SK Tim Penyusun LAKIP SKPD ditandatangani Inspektur	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim LAKIP SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi					Jadwal/agenda kerja dan matrik (checklist)materi /bahan penyusunan LAKIP	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan LAKIP	
5	Perumusan Rancangan LAKIP SKPD					Data dan informasi (tupoksi, struktur tata laksana, kepegawaian) dan ol.renstra,IKU, RKT,RKA,Lakip thn sebelumnya dan info selainya	7 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorasi hasil	

6	Analisis					Gambaran tupokasi,SDM, kinerja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis,visi misi tujuan/sasaran jangka menengah,program/kegiatan/indikator kinerja/lelompok sasaran dan pendanaan indikatif	7 hari	Teridentifikasi tingkat,capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu strategis, Teridentifikasi program/kegiatan yang beroreantasi hasil	
7	Penyajian Rancangan LAKIP SKPD					Draf rancangan LAKIP SKPD sesuai hasil analitis	1 hari	Tersusunnya naskah rancangan LAKIP SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir LAKIP SKPD					Naskah Rancangan LAKIP SKPD	3 Hari	Penjelasan rancangan LAKIP SKPD(visi misi,keseleraantujuan,sasaran ,strategi,kebijakan, program dan kegiatan) dan pemenuhan target kinerja dan keuangan.	
9	Penyajian Rancangan Akhir LAKIP SKPD					Rancangan LAKIP SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelerasan	1 Hari	Dokumen LAKIP ditetapkan oleh inspektur Dokumen LAKIP ditetapkan oleh	
10	Penetapan LAKIP SKPD					yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Inspektur,dan dilakukan pengadaan dokumen oleh Sekretariat	

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN

- Kabupaten : Tanah Laut
- Nama SKPD : Kecamatan Bajuin
- Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
- Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUSAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Kepada Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Yang Ada Di Kecamatan (IKM)	Hasil Survey	Semua Seksi di Kecamatan Bajuin

Bajuin, Januari 2021

KAMAT BAJUIN



[Handwritten Signature]

MAHRIN FAUZI S.Sos
Pembina
NIP.196901301990021002

METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TAHUN 2021

No.	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian Kinerja PD			Data Dukung	Keterangan
						Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11
L	KANTOR KECAMATAN BAJUIN									
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	Jumlah aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran ----- x 100 Jumlah aparatur SKPD Jumlah aparatur SKPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran Jumlah aparatur SKPD	100 13 13	100 14 14	107	Data laporan LAKIP SKPD	
		2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase sarana dan prasarana yang layak fungsi	%	Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi ----- x 100 Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah sarana dan prasarana yang layak fungsi Jumlah seluruh sarana prasarana	100 367 367	100 367 367	100	Data laporan LAKIP SKPD	
		3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	kegiatan	Jumlah jenis Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP dalam 1 tahun	15	15	100	Data laporan LAKIP SKPD	
			2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	pengaduan	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi dalam 1 tahun	2	2	100	Data laporan LAKIP SKPD	
			3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	dokumen	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam 1 tahun	1	1	100	Data laporan LAKIP SKPD	
		4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Kemasyarakatan)	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	kelompok	Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan dalam 1 tahun	1	1	100	Data laporan LAKIP SKPD	
			2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	Kegiatan	Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP dalam 1 tahun	6	6	100,00	Data laporan LAKIP SKPD	
			3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	KK	Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial dalam 1 tahun	747	2657	355	Data laporan LAKIP SKPD	
		5. Program Penyelenggaraan Urusan	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	desa	Jumlah Desa yang mengelola administrasi dengan baik dalam 1 tahun	9	9	100	Data laporan LAKIP SKPD	

No.	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian Kinerja PD			Data Dukung	Keterangan
						Target 2021	Realisasi 2021	Tingkat Capaian Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11
		Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (TAPEM)	2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	desa	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat desa dan BPD dalam 1 tahun	9	9	100	Data laporan LAKIP SKPD	
			3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	desa	Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat dalam 1 tahun	9	9	100	Data laporan LAKIP SKPD	
			4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	kegiatan	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan dalam 1 tahun	1	1	100	Data laporan LAKIP SKPD	
			6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	kegiatan	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan dalam 1 tahun	1	1	100	Data laporan LAKIP SKPD
		2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik		Desa	Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik dalam 1 tahun	9	9	100	Data laporan LAKIP SKPD	
		3. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP		dokumen	Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP dalam 1 tahun	10	6	60	Data laporan LAKIP SKPD	
		4. Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik		desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dgn baik dalam 1 tahun	9	9	100	Data laporan LAKIP SKPD	
		7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya dalam 1 tahun	9	3	33,33	Data laporan LAKIP SKPD	

Bajuin, 3 Januari 2022

CAMAT BAJUIN



NAHRIN FAUZI, S. Sos
NIP. 19690130 199002 1 002

METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH 2021

No.	Nama PD	Sasaran PD	IKU PD	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian Kinerja PD		Persentase Capaian	Alasan/Permasalahan jika tidak tercapai	Data Pendukung (bukti Fisik)	Keterangan Lain-Lain
						Target 2021	Realisasi 2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7*100	10	11	12
	Kantor Kecamatan Bajuin	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	%	Hasil Survei	87	83,64	96,14	<p>unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah (unsur persyaratan dan kompetensi pelaksana) dikarena :</p> <p>1). Berkas persyaratan yang disampaikan tidak lengkap sehingga tidak bisa diselesaikan secara cepat dan tepat waktu, masyarakat selalu ingin cepat namun persyaratan yg disampaikan sering sekali tidak lengkap/kurang sehingga sering terjadi keterlambatan.</p> <p>2). Kurangnya personil yang menangani pelayanan sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Bajuin, hal tersebut sangat terasa apabila banyak sekali masyarakat yang mengajukan pelayanan, sering terjadi penumpukan berkas hal tersebutlah yang membuat rendahnya unsur kompetensi pelaksana.</p>	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kantor Kec. Bajuin Tahun 2021	

Bajuin, 03 Januari 2022

CAMAT BAJUIN



MARRIN FAUZI, S. Sos
NIP. 19690130 199002 1 002

POHON KINERJA SKPD KECAMATAN BAJUIN

Kinerja Camat :
 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Indikator Kinerja :
 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Umum Yang Ada Di Kecamatan

Kinerja Sekcam

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan , Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Indikator Kinerja :

1. Nilai SAKIP Kecamatan
2. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian Yang Tertib

Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian :

1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor
3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Indikator Kinerja :

1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik
2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik
3. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian

Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :

1. Menyusun dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan
2. Menyusun laporan Kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan

Kinerja Kasi Pemerintahan

1. Fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD
2. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD
3. Monitoring penyusunan laporan kependudukan
4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik
2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD
3. Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat
4. Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan

Kinerja Kasi Kemasyarakatan

1. Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan
2. Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan
3. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan
2. Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP.
3. Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya

Kinerja Kasi PMD

1. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi.
2. Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat.
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4. Memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil
5. Fasilitasi kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja :

1. jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya
2. Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik
3. Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik
4. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP
5. Jumlah fasilitasi pelaksanaan Musrembang tingkat kecamatan

Kinerja Kasi Trantib

1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan
2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketertarikan dan ketertiban
3. Monitoring penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat di kecamatan

Indikator Kinerja :

1. Jumlah penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi
2. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketertarikan dan ketertiban yang aktif
3. Jumlah penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring
4. Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring

Kinerja Kasi Pelayanan

1. Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
2. Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat
3. Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Indikator Kinerja :

1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP
2. Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi
3. Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Bajuin, Januari 2021

CAMAT BAJUIN,



NAHRIN FAUZI, S.Sos
 Pembina
 NIP. 19690130 199002 1 002

**MATRIK SINKRONISASI PROGRAM RPJMD, RKPD, RKA, DPA KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021**

NO	NAMA PROGRAM				
	RPJMD	RKPD	RENJA	RKA	DPA
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia				
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD				
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5	Program Koordinasi dan Fasilitas ketenteraman dan ketertiban Umum Masyarakat	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Program Koordinasi dan Fasilitas kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7	Program Koordinasi dan fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa				
8	Program perencanaan pembangunan Kecamatan	5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
9	Program Pemberdayaan Masyarakat	6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Bajuin, Januari 2021
CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
 Pembina
 NIP.19690130 199002 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP. 19690130 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : CAMAT (Pejabat Eselon III a)
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	87

Keterangan :

- * Jumlah Program : 6 Program
- * Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 25 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : **Rp 3.776.899.266**

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.031.937.006
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.457.630
a.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.499.850
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.447.449.472
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962
b.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2.776.510
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	8.956.200
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.205.420
a.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.653.200
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230
d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.696.440
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760
f.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.217.500
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	224.916.044
a.	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400
b.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432
6.	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	70.952.240
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33.300.000

b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000
c.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	31.352.240
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.749.610
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	6.749.610
a.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.610
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.343.200
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.343.200
a.	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	17.160.000
b.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	22.183.200
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.429.790
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	9.429.790
a.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	9.429.790
5.	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	662.364.780
1.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	662.364.780
a.	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	80.765.480
b.	Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	581.599.300
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.074.880
1.	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	27.074.880
a.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	14.207.780
b.	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	12.867.100

Bajuin, 4 Januari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021



NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP. 19690130 199002 1 002

SEKRETARIS

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : SEKRETARIS CAMAT
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	81
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	2. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kebudayaan yang Tertib	100%

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 17 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : **Rp 3.031.937.006**

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.031.937.006
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.457.630
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.499.850
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.447.449.472
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962
	b. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2.776.510
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200
	a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	8.956.200
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.205.420
	a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.653.200
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.696.440
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760
	f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.217.500
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	224.916.044
	a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400
	b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432

6.	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	70.952.240
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33.300.000
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000
c.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	31.352.240

Bajuin, 4 Januari 2021



NAHRIN FAUZI, S.Sos

NIP. 19690130 199002 1 002

SEKRETARIS

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI JUANA, S.Pi

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN,

SRI JUANA, S.Pi
NIP.19800118 200501 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 4 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 2.450.907.102

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.450.907.102
	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.457.630
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.499.850
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780
	2. Administrasi keuangan perangkat daerah	2.447.449.472
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962
	b. Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	2.776.510

Bajuin, 4 Januari 2021

SEKRETARIS

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

SRI JUANA, S.Pi

NIP. 19800118 200501 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen

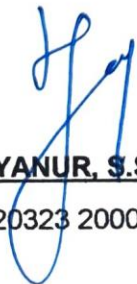
Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 4 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 2.450.907.102

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.450.907.102
1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.457.630
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.499.850
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780
2. Administrasi keuangan perangkat daerah	2.447.449.472
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962
b. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2.776.510

Bajuin, 4 Januari 2021

SEKRETARIS



H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



SRI JUANA, S.Pi

NIP. 19800118 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAD
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

SEKRETARIS,


H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


RAHMAD
NIP.19641130 198903 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	100%
2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor	2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	367 Unit
2. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	13 Orang

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 13 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : **Rp 581.029.904**

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	581.029.904
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200
a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	8.956.200
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.205.420
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.653.200
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.696.440
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.217.500
3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	224.916.044
a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400
b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432
4. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	70.952.240
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33.300.000
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000
c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	31.352.240

Bajuin, 4 Januari 2021

SEKRETARIS

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

RAKHMAD

NIP. 19641130 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP

Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 6 September 2021

SEKRETARIS,

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004

KASUBBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN,

ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP
NIP.19950227 201708 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	2. Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 4 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 2.450.907.102

1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.450.907.102
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.457.630
a.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.499.850
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.447.449.472
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962
b.	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	2.776.510

Bajuin, 6 September 2021



SEKRETARIS

H. SAHRİYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004



KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ANGGA RAMADHAN NOOR LUBIS, S.STP

NIP. 19950227 201708 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAISAL KHALIL, S.Sos
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 19 April 2021

SEKRETARIS,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si
NIP. 19820323 200012 1 004


FAISAL KHALIL, S.Sos
NIP.19810201 200701 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	100%
2. Pemenuhan Sarana dan Prasanana Kantor	2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan Baik	367 Unit
3. Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	13 Orang

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 13 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 581.029.904

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	581.029.904
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200
a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.	8.956.200
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.205.420
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.653.200
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.696.440
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	98.217.500
3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	224.916.044
a. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400
b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432
4. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	70.952.240
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33.300.000
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000
c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	31.352.240

Bajuin, 19 April 2021

SEKRETARIS

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

H. SAHRIYANUR, S.STP, M.Si

NIP. 19820323 200012 1 004

FAISAL KHALIL, S.Sos

NIP. 19810201 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUDIN, S.Sos
Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

KASI PELAYANAN,


SYAMSUDIN, S.Sos
NIP.19660514 198903 1 010


CAMAT BAJUIN,
NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP.19690130 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASI PELAYANAN
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	2 Pengaduan
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen

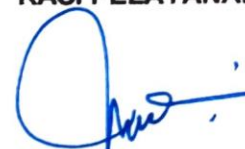
Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 6.749.610

- | | |
|---|-----------|
| 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 6.749.610 |
| 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 6.749.610 |
| a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6.749.610 |

Bajuin, 4 Januari 2021

KASI PELAYANAN



SYAMSUDIN, S.Sos

NIP.19660514 198903 1 010



NAHRIN FAUZI, S.Sos

NIP.19690130 199002 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD RIDHA S.KEP, NERS
Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : Camat Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 19 April 2021

KASI PELAYANAN ,

AKHMAD RIDHA S.KEP, NERS
NIP.19741010 199502 1 001



CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP.19690130 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASI PELAYANAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Jenis Pelayanan
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi	2 Pengaduan
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	3. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 6.749.610

- | | | |
|-----------|---|------------------|
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 6.749.610 |
| 1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 6.749.610 |
| a. | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 6.749.610 |


CAMAT BAJUIN



NAHRIN FAUZI, S.Sos
 NIP. 19690130 199002 1 002

Bajuin, 19 April 2021

KASI PELAYANAN



AKHMAD RIDHA, S. KEP. NERS
 NIP.19741010 199502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
Jabatan : Plt. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP. 19690130 199002 1 002

Plt. KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN,

MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
NIP. 19750309 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : PIt. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET 3
1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 kejadian
2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	2. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	9 kelompok
3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	3. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	3 kejadian
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	4. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 9.429.790

1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.429.790
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	9.429.790
a.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	9.429.790

Bajuin, 4 Januari 2021



PIt.KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
 NIP. 19750309 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUDIN, S. Sos
Jabatan : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 19 April 2021



CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP. 19690130 199002 1 002

KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN,

SYAMSUDIN, S. Sos
NIP. 19660514 198903 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memfasilitasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	1. Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	1 kejadian
2. Membina kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	2. Jumlah Kelompok Masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang aktif	9 kelompok
3. Monitoring Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	3. Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	3 kejadian
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	4. Jumlah Sosialisasi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan

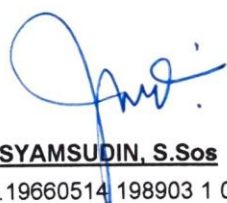
Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : **Rp 9.429.790**

1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.429.790
1.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	9.429.790
a.	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	9.429.790

Bajuin, 19 April 2021


CAMAT BAJUIN
NAHRIN FAUZI, S.Sos
 NIP. 19690130 199002 1 002

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SYAMSUDIN, S.Sos
 NIP.19660514 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.SUPIANI
Jabatan : KASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

KASI KEMASYARAKATAN

Drs. Supiani

NIP.19630106 200801 1 006



CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP.19690130 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASI KEMASYARAKATAN (Pejabat Eselon IV a)
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 kelompok
2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	6 kegiatan
3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	747 KK

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 581.599.300

1. PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	581.599.300
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	581.599.300
a. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	581.599.300



NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP. 19690130 199002 1 002

Bajuin, 4 Januari 2021
KASI KEMASYARAKATAN

Drs. SUPIANI
NIP. 19630106 200801 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNADI, SKM
Jabatan : PIt. KASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 2 Februari 2021

PIt. KASI KEMASYARAKATAN

YUNADI, SKM
NIP.19670312 198903 1 013



CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP.19690130 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : PIt. KASI KEMASYARAKATAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 kelompok
2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	6 kegiatan
3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial	747 KK

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 581.599.300

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 581.599.300 |
| 1. | Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 581.599.300 |
| a. | Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional | 581.599.300 |



NAHRIN FAUZI, S.Sos
 NIP. 19690130 199002 1 002

Bajuin, 2 Februari 2021
 PIt. KASI KEMASYARAKATAN

YUNADI, SKM
 NIP. 19670312 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNADI, SKM
Jabatan : KASI KEMASYARAKATAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 19 April 2021

CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP.19690130 199002 1 002

KASI KEMASYARAKATAN

YUNADI, SKM
NIP.19670312 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASI KEMASYARAKATAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memberikan Pembinaan Kepada Kelompok Organisasi Masyarakat di bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Kelompok Organisasi Masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	1 kelompok
2. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosia, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	2. Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan Olahraga yang sesuai SOP	6 kegiatan
3. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di Kecamatan	3. Jumlah Masyarakat Tidak Mampu yang di Fasilitas Penyaluran Bantuan Sosial	747 KK

Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 581.599.300

1. PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	581.599.300
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	581.599.300
a. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	581.599.300



NAHRIN FAUZI, S.Sos

NIP. 19890130 199002 1 002

Bajuin, 19 April 2021

KASI KEMASYARAKATAN

YUNADI, SKM

NIP. 19670312 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NOOR, S.Sos
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021



KASI TATA PEMERINTAHAN

MUHAMMAD NOOR, S.Sos
NIP.19670626 1989031 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASI TATA PEMERINTAHAN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memfasilitasi Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa dan BPD	1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	9 Desa
2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	9 Desa
3. Memonitoring Penyusunan Laporan Kependudukan	3. Jumlah Desa yang Data Kependudukannya terverifikasi Dengan Akurat	9 Desa
4. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	4. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kegiatan


Keterangan :

- * Jumlah Program : 1 Program
- * Jumlah Kegiatan : 1 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 1 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 80.765.480

1.	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.765.480
1.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	80.765.480
a.	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	80.765.480

Bajuin, 4 Januari 2021


CAMAT BAJUIN
NAHRIN FAUZI, S.Sos
 NIP. 19690130 199002 1 002

KASI TATA PEMERINTAHAN

MUHAMMAD NOOR, S.Sos
 NIP. 19670626 198903 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NAHRIN FAUZI, S.Sos
Jabatan : CAMAT BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021



CAMAT BAJUIN,

NAHRIN FAUZI, S.Sos
NIP.19690130 199002 1 002

KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA,

MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
NIP.19750309 200501 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	9 kelompok
2. Memberikan Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa yang Akurat	2. Jumlah Desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	9 dokumen
3. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	3. Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	9 desa
4. Memberikan Pelayanan Administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non Komersial	4. Jumlah pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) non komersil sesuai SOP	10 dokumen
5. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	5. Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	1 kegiatan

Keterangan :

- * Jumlah Program : 2 Program
- * Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan
- * Jumlah sub Kegiatan : 4 sub Kegiatan
- * Jumlah Anggaran : Rp 93.492.960

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66.418.080
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.343.200
a. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	17.160.000
b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	22.183.200
2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.074.880
1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	27.074.880
a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	14.207.780
b. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	12.867.100

Bajuin, 4 Januari 2021



**KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA**


MUHAMMAD NOOR, S.Sos, M.AB
NIP. 19750309 200501 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin

B A J U I N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNADI,SKM
Jabatan : ANALIS DATA DAN INFORMASI PADA SEKSI TATA
PEMERINTAHAN KECAMATAN BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MUHAMMAD NOOR,S.Sos
Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 1 Februari 2021

KASI TATA PEMERINTAHAN

MUHAMMAD NOOR,S.Sos
NIP.19670626 1989031 014

ANALIS DATA DAN INFORMASI

YUNADI,SKM
NIP. 19670312 198903 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : ANALIS DATA DAN INFORMASI PADA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN BAJUIN
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	1. Jumlah dokumen bahan kerja	20 Dokumen
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Data dan Informasi dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	2. Jumlah dokumen hasil analisa	20 Dokumen
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Data dan Informasi dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	3. Jumlah laporan hasil penelitian	20 Laporan
4. Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	4. Jumlah laporan hasil kerja	20 Laporan
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	5. Jumlah data yang disampaikan ke pimpinan	20 Dokumen
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	6. Jumlah laporan kegiatan kedinasan lain	20 Laporan

Bajuin, 1 Februari 2021

KASI TATA PEMERINTAHAN


MUHAMMAD NOOR, S.Sos
NIP. 19670626 198903 1 014

ANALIS DATA DAN INFORMASI


YUNADI, SKM
NIP. 19670312 198903 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PADA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC.BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SRI JUANA, S.Pi
Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

SRI JUANA, S.Pi
NIP.19800118 200501 2 016

BENDAHARA

LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE
NIP. 19840817 200903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : BENDAHARA PENGELUARAN PADA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC.BAJUIN
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	1. Jumlah dokumen pengelolaan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan	4 Dokumen
2. Mengajukan surat permintaan pembayaran berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan	2. Jumlah surat permintaan pembayaran yang diajukan	36 Dokumen
3. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	3. Jumlah surat perintah membayar uang SPM Giro yang diurus	36 Dokumen
4. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	4. Jumlah pembayaran atas tagihan yang dilaksanakan	250 kwitansi
5. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	5. Jumlah permintaan uang muka yang dilayani	1 Laporan
6. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	6. Jumlah formulir daftar penerimaan dan pengeluaran uang yang disusun	30 Laporan
7. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	7. Jumlah laporan yang dibuat	20 Laporan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	8. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	40 Laporan

Bajuin, 4 Januari 2021

**KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN**


SRI JUANA, S.Pi

NIP. 19800118 200501 2 016

BENDAHARA


LIDIA MIRANTI MAYASARI, SE

NIP. 19840817 200903 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRY ANANDA, A.M.d. Pjk
Jabatan : PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN KEC.BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAKHMAD
Jabatan : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

KASUBBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

RAKHMAD
NIP. 19641130 198903 1 009

PENGELOLAAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR

FERRY ANANDA, A.M.d. Pjk
NIP. 19850325 200801 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEC.BAJUIN
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	1. Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan sarana dan prasarana kantor	4 Dokumen
2. Memantau Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	2. Jumlah kegiatan pemantauan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan bidang tugasnya	36 Dokumen
3. Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	3. Jumlah dokumen hasil pengendalian program	40 Dokumen
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	4. Jumlah pelaksanaan program yang dikoordinasikan	20 Dokumen
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	5. Jumlah laporan berkala yang disusun	24 Laporan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	6. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	30 Laporan

Bajuin, 4 Januari 2021

KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN



RAKHMAD

NIP. 19641130 198903 1 009

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR



FERRY ANANDA, A.M.d. Pk

NIP. 19850325 200801 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL HASANAH,A.Md
Jabatan : PENGOLAH DATA PELAYANAN PADA SEKSI PELAYANAN
KECAMATAN BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SYAMSUDIN,S.Sos
Jabatan : KASI PELAYANAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 18 Januari 2021

KASI PELAYANAN ,

SYAMSUDIN,S.Sos
NIP.19660514 198903 1 010

PENGOLAH DATA PELAYANAN

NURUL HASANAH,A.Md
NIP. 19980818 202012 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : PENGOLAH DATA PELAYANAN PADA SEKSI PELAYANAN KECAMATAN BAJUIN
 SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
 TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data dan penyajian data	1. Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk yang dipelajari	15 Dokumen
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan-bahan kegiatan berdasarkan jenis data pelayanan untuk disajikan	2. Jumlah laporan hasil pemeriksaan data	15 Laporan
3. Menganalisis data dan penyajian data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk	3. Jumlah dokumen hasil analisis data	2 Dokumen
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data dan penyajian data yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan di olah	4. Jumlah dokumen hasil rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis data dan penyajian data	15 Dokumen
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya	5. Jumlah dokumen perkembangan dan permasalahan pengumpulan dan penyajian data secara periodik	2 Dokumen
6. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut	6. Jumlah dokumen data yang disajikan	15 Dokumen
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	7. Jumlah laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan	12 Laporan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	8. Jumlah laporan tugas kedinasan lain	10 Laporan

Bajuin, 18 Januari 2021

KASI PELAYANAN


SYAMSUDIN, S.Sos
 NIP. 19660514 198903 1 010

PENGOLAH DATA PELAYANAN


NURUL HASANAH, A.Md
 NIP. 19980818 202012 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KECAMATAN BAJUIN

Jalan Bajuin Raya No.01 RT.06 Desa Bajuin
BAJUIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUDIARTO
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PADA
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. BAJUIN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SRI JUANA, S.Pi
Jabatan : KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bajuin, 4 Januari 2021

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN

SRI JUANA, S.Pi
NIP.19800118 200501 2 016

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN
DAN PROGRAM

BUDIARTO
NIP. 19800901 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : PENGADMINISTRASI PERENCANAAN & PROGRAM PADA
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KEC. BAJUIN

SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN

TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Menerima, mencatat dan menyortir administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	1. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang disortir	120 Dokumen
2. Memberi lembar pengantar pada administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	2. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang diberi lembar pengantar	120 Dokumen
3. Mengelompokkan administrasi perencanaan dan program atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	3. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang dikelompokkan	120 Dokumen
4. Mendokumentasikan administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	4. Jumlah administrasi perencanaan dan program yang didokumentasikan	120 Dokumen
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	5. Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	120 Laporan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	6. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	120 Laporan

Bajuin, 4 Januari 2021

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN
KEUANGAN



SRI JUANA, S.Pi

NIP. 19800118 200501 2 016

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN
PROGRAM



BUDIARTO

NIP. 19800901 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

JABATAN : PENGADMINISTRASIAN UMUM PADA SEKSI
KEMASYARAKATAN KEC. BAJUIN
SOPD : KANTOR KECAMATAN BAJUIN
TAHUN ANGGARAN : 2021

SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET 3
1. Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	1. Jumlah administrasi umum yang disortir	240 Dokumen
2. Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	2. Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	240 Dokumen
3. Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	3. Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	60 Dokumen
4. Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	4. Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	60 Dokumen
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban	5. Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	6. Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12 Laporan

Bajuin, 4 Januari 2021

KASI KEMASYARAKATAN


Drs. SUPIANI

NIP. 19630106 200801 1 006

PENGADMINISTRASI UMUM


M. IDIANPARI

NIP. 19640407 20212 1 001

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			22.183.200	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.168.750	14,28%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	37%	100%	37%	22.183.200	22.183.200	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																													
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																													
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			9.429.790	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	9.429.790	9.429.790	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																													
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																													
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			0	0,00%	0	0,00%	54.721.260	67,75%	0	0,00%	28.044.220	32,25%	20.732.400	25,67%	0	0,00%	0	0,00%	0%	0%	68%	0%	100%	100%	100%	100%	80.765.480	80.765.480	0
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Cuna Menuju Jalan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			581.599.300	100,00%	29.745.000	5,11%	0	0,00%	56.443.500	9,70%	0	0,00%	70.250.000	12,08%	0	0,00%	0	0,00%	100%	10%	100%	20%	100%	38%	100%	38%	581.599.300	538.815.900	-42.783.400
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																													
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa																													
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			14.207.780	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	6.450.000	45,40%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	7%	100%	7%	100%	50%	14.207.780	14.207.780	0
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12.887.100	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	100%	0%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	12.887.100	12.887.100	0
				1.514.779.188	39,9%	571.313.541	15,1%	1.010.128.049	26,6%	0	0,0%	664.309.951	17,5%	704.330.187	18,6%	587.682.080	15,5%	0	0,0%									377899286,0	3792312700,0	

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN 1
KECAMATAN BAJUIN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850,00	1.499.850,00	100,00%	1.499.850,00	42,90%	0,02%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780,00	1.957.780,00	0,00%	0,00	23,81%	0,01%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962,00	2.444.672.962,00	21,43%	523.858.495,00	21,43%	13,87%	472.699.691,00	19,34%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510,00	2.776.510,00	53,63%	1.489.070,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.956.200,00	8.956.200,00	100,00%	8.956.200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.200,00	2.653.200,00	100,00%	2.653.200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290,00	152.027.940,00	96,71%	114.388.890,00	4,76%	0,15%	12.884.300,00	10,89%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230,00	50.665.230,00	25,00%	12.666.309,00	8,00%	0,11%	5.495.000,00	10,85%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.696.440,00	3.696.440,00	62,50%	2.310.440,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760,00	2.696.760,00	25,11%	677.160,00	25,00%	0,02%	440.000,00	16,32%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.217.500,00	107.217.500,00	55,36%	54.375.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212,00	93.822.804,00	26,91%	23.167.776,00	25,00%	0,57%	23.091.351,00	26,82%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400,00	46.998.400,00	78,72%	36.999.000,00	23,10%	0,29%	2.714.848,00	5,78%	Tidak Ada	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432,00	99.540.024,00	31,62%	29.036.696,00	15,88%	0,39%	23.378.351,00	25,46%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.300.000,00	33.300.000,00	62,50%	20.812.080,00	16,70%	0,15%	865.000,00	2,60%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	55,56%	3.500.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.352.240,00	31.352.240,00	100,00%	31.352.240,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	14.207.780,00	100,00%	14.207.780,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	12.867.100,00	100,00%	12.867.100,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
		3.776.899.266	3.792.312.700	39,94%	1.514.779.186		17,11%	571.313.541	15,13%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN 2
KECAMATAN BAJUIN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850,00	1.499.850,00	100,00%	1.499.850,00	57,10%	0,02%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780,00	1.957.780,00	70,22%	1.374.780,00	61,90%	0,03%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962,00	2.444.672.962,00	57,14%	1.396.955.986,00	57,10%	36,96%	1.023.078.089,00	41,85%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510,00	2.776.510,00	81,68%	2.267.870,00	63,60%	0,05%	1.049.300,00	37,79%	Tidak Ada	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.956.200,00	8.956.200,00	100,00%	8.956.200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.200,00	2.653.200,00	100,00%	2.653.200,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290,00	152.027.940,00	96,71%	114.388.890,00	39,00%	1,22%	44.924.300,00	37,98%	Tidak Ada	

7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.765.480,00	80.765.480,00	67,75%	54.721.260,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	581.599.300,00	538.815.900,00	100,00%	581.599.300,00	20,00%	3,08%	86.188.500,00	14,82%	Tidak Ada	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	14.207.780,00	100,00%	14.207.780,00	6,70%	0,03%	6.450.000,00	45,40%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	12.867.100,00	100,00%	12.867.100,00	50,00%	0,17%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
		3.776.899.266	3.792.312.700	66,58%	2.524.907.235		45,95%	1.290.766.979	34,18%		

7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.610,00	6.749.610,00	100,00%	6.749.610,00	100,00%	0,18%	5.324.600,00	78,89%	Tidak Ada	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.183.200,00	22.183.200,00	100,00%	22.183.200,00	36,70%	0,22%	3.168.750,00	14,28%	Tidak Ada	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum										
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.429.790,00	9.429.790,00	100,00%	9.429.790,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.765.480,00	80.765.480,00	100,00%	80.765.480,00	100,00%	2,14%	20.732.400,00	25,67%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	581.599.300,00	538.815.900,00	100,00%	581.599.300,00	37,50%	5,77%	156.438.500,00	26,90%	Tidak Ada	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	14.207.780,00	100,00%	14.207.780,00	6,70%	0,03%	6.450.000,00	45,40%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	12.867.100,00	100,00%	12.867.100,00	50,00%	0,17%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
		3.776.899.266	3.792.312.700	84,10%	3.189.217.186		69,36%	1.995.097.166	52,82%		

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2021
TRIWULAN 4
KECAMATAN BAJUIN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850,00	1.499.850,00	100,00%	1.499.850,00	100,00%	0,04%	1.052.100,00	70,15%	Tidak Ada	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780,00	1.957.780,00	100,00%	1.957.780,00	100,00%	0,05%	1.380.000,00	70,49%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.444.672.962,00	2.444.672.962,00	100,00%	2.444.672.962,00	100,00%	64,46%	1.820.975.716,00	74,49%	Tidak Ada	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510,00	2.776.510,00	100,00%	2.776.510,00	100,00%	0,07%	1.996.100,00	71,89%	Tidak Ada	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.956.200,00	8.956.200,00	100,00%	8.956.200,00	100,00%	0,24%	8.866.000,00	98,99%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.200,00	2.653.200,00	100,00%	2.653.200,00	100,00%	0,07%	2.653.200,00	100,00%	Tidak Ada	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290,00	152.027.940,00	100,00%	152.027.940,00	100,00%	4,01%	143.169.300,00	94,17%	Tidak Ada	

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80.765.480,00	80.765.480,00	100,00%	80.765.480,00	100,00%	2,13%	20.732.400,00	25,67%	Tidak Ada	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	581.599.300,00	538.815.900,00	100,00%	538.815.900,00	100,00%	14,21%	525.543.500,00	97,54%	Tidak Ada	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	14.207.780,00	100,00%	14.207.780,00	100,00%	0,37%	12.622.400,00	88,84%	Tidak Ada	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	12.867.100,00	100,00%	12.867.100,00	50,00%	0,17%	3.735.000,00	29,03%	Tidak Ada	
		3.776.899.266	3.792.312.700	100,00%	3.792.312.700		99,14%	2.988.655.500	78,81%		




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 31 Maret 2021

Urusan Pemerintahan	: 4 . 11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4 . 11 . 01	Kantor Kecamatan Bajuin
Sub Unit Organisasi	: 4 . 11 . 01 . 01	Kantor Kecamatan Bajuin

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.457.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.630,00
4.11 . 4.11.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.850,00
4.11 . 4.11.01.01 . 01.06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Sektisair Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.780,00
4.11 . 4.11.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.776.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.510,00
4.11 . 4.11.01.01 . 02.04	Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.510,00
4.11 . 4.11.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.205.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.205.420,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.276.290,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.665.230,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.696.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.440,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.760,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.217.500,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.916.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.916.044,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.100.212,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.998.400,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.817.432,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.952.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.952.240,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.352.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352.240,00
4.11 . 4.11.01.01 . 16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.749.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749.610,00
4.11 . 4.11.01.01 . 16.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749.610,00
4.11 . 4.11.01.01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.343.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 19.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.01.01 . 19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.183.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.429.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.790,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.429.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.790,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	223.009.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.009.780,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	80.765.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.765.480,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	142.244.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.244.300,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.074.880,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207.780,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867.100,00
JUMLAH		892.871.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.871.304,00

Pekanbaru, 1 Januari 2021
CAMAT BAJUIN

NAHFIN FAUZI, S.SOS
 NIP. 2990130 199002 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 30 Juni 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.457.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457.630,00
4.11 . 4.11.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.850,00
4.11 . 4.11.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.780,00
4.11 . 4.11.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.776.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.510,00
4.11 . 4.11.01.01 . 02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.510,00
4.11 . 4.11.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.956.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.205.420,00	30.894.300,00	0,00	0,00	30.894.300,00	11,19	245.311.120,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290,00	13.324.300,00	0,00	0,00	13.324.300,00	11,27	104.951.990,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230,00	9.865.000,00	0,00	0,00	9.865.000,00	19,47	40.800.230,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.696.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.440,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	32,63	1.816.760,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.217.500,00	6.825.000,00	0,00	0,00	6.825.000,00	6,95	91.392.500,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.916.044,00	81.768.823,00	0,00	0,00	81.768.823,00	36,36	143.147.221,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212,00	38.412.135,00	0,00	0,00	38.412.135,00	44,61	47.688.077,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400,00	4.517.553,00	0,00	0,00	4.517.553,00	9,61	42.480.847,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432,00	38.839.135,00	0,00	0,00	38.839.135,00	42,30	52.978.297,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.952.240,00	2.946.000,00	0,00	0,00	2.946.000,00	4,15	68.006.240,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.300.000,00	2.946.000,00	0,00	0,00	2.946.000,00	8,85	30.354.000,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.352.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.352.240,00
4.11 . 4.11.01.01 . 16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.749.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749.610,00
4.11 . 4.11.01.01 . 16.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749.610,00
4.11 . 4.11.01.01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.343.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.343.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 19.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.01.01 . 19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.183.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.429.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.790,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.429.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.790,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	223.009.780,00	76.812.500,00	0,00	0,00	76.812.500,00	34,44	146.197.280,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	80.765.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.765.480,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	142.244.300,00	76.812.500,00	0,00	0,00	76.812.500,00	54,00	65.431.800,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	14,96	23.024.880,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00	28,51	10.157.780,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867.100,00
JUMLAH		892.871.304,00	196.471.623,00	0,00	0,00	196.471.623,00	22,00	696.399.681,00





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

per 30 September 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.457.630,00	1.624.200,00	0,00	0,00	1.624.200,00	46,97	1.833.430,00
4.11 . 4.11.01.01 . 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.499.850,00	812.100,00	0,00	0,00	812.100,00	54,15	687.750,00
4.11 . 4.11.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.957.780,00	812.100,00	0,00	0,00	812.100,00	41,48	1.145.680,00
4.11 . 4.11.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.776.510,00	1.049.300,00	0,00	0,00	1.049.300,00	37,79	1.727.210,00
4.11 . 4.11.01.01 . 02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.776.510,00	1.049.300,00	0,00	0,00	1.049.300,00	37,79	1.727.210,00
4.11 . 4.11.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.956.200,00	8.866.000,00	0,00	0,00	8.866.000,00	98,99	90.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.956.200,00	8.866.000,00	0,00	0,00	8.866.000,00	98,99	90.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.205.420,00	48.203.100,00	0,00	31.600.000,00	79.803.100,00	28,89	196.402.320,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.653.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.200,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.276.290,00	13.449.300,00	0,00	31.600.000,00	45.049.300,00	38,09	73.226.990,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.665.230,00	19.351.300,00	0,00	0,00	19.351.300,00	38,19	31.313.930,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.696.440,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	18,26	3.021.440,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.696.760,00	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	65,26	936.760,00
4.11 . 4.11.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.217.500,00	12.967.500,00	0,00	0,00	12.967.500,00	13,20	85.250.000,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.916.044,00	133.718.804,00	0,00	0,00	133.718.804,00	59,45	91.197.240,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	86.100.212,00	61.576.911,00	0,00	0,00	61.576.911,00	71,52	24.523.301,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.998.400,00	7.468.982,00	0,00	0,00	7.468.982,00	15,89	39.529.418,00
4.11 . 4.11.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.817.432,00	64.672.911,00	0,00	0,00	64.672.911,00	70,44	27.144.521,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.952.240,00	27.306.600,00	0,00	0,00	27.306.600,00	38,49	43.645.640,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertinjan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.300.000,00	8.617.500,00	0,00	0,00	8.617.500,00	25,88	24.682.500,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
4.11 . 4.11.01.01 . 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.352.240,00	18.689.100,00	0,00	0,00	18.689.100,00	59,61	12.663.140,00
4.11 . 4.11.01.01 . 16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.749.610,00	5.324.600,00	0,00	0,00	5.324.600,00	78,89	1.425.010,00
4.11 . 4.11.01.01 . 16.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.749.610,00	5.324.600,00	0,00	0,00	5.324.600,00	78,89	1.425.010,00
4.11 . 4.11.01.01 . 19	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.343.200,00	168.750,00	0,00	0,00	168.750,00	0,43	39.174.450,00
4.11 . 4.11.01.01 . 19.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160.000,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.01.01 . 19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.183.200,00	168.750,00	0,00	0,00	168.750,00	0,76	22.014.450,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.429.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.790,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.429.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429.790,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	223.009.780,00	106.920.900,00	0,00	0,00	106.920.900,00	47,94	116.088.880,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	80.765.480,00	20.732.400,00	0,00	0,00	20.732.400,00	25,67	60.033.080,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	142.244.300,00	86.188.500,00	0,00	0,00	86.188.500,00	60,59	56.055.800,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880,00	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	23,82	20.624.880,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	45,40	7.757.780,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867.100,00
JUMLAH		892.871.304,00	339.632.254,00	0,00	31.600.000,00	371.232.254,00	41,58	521.639.050,00



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.11 . 4.11.01.01 . 19.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.183.200,00	20.862.050,00	0,00	0,00	20.862.050,00	94,04	1.321.150,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.429.790,00	8.602.500,00	0,00	0,00	8.602.500,00	91,23	827.290,00
4.11 . 4.11.01.01 . 25.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.429.790,00	8.602.500,00	0,00	0,00	8.602.500,00	91,23	827.290,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.226.380,00	106.920.900,00	0,00	0,00	106.920.900,00	59,33	73.305.480,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	80.765.480,00	20.732.400,00	0,00	0,00	20.732.400,00	25,67	60.033.080,00
4.11 . 4.11.01.01 . 27.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	99.460.900,00	86.188.500,00	0,00	0,00	86.188.500,00	86,66	13.272.400,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.074.880,00	16.357.400,00	0,00	0,00	16.357.400,00	60,42	10.717.480,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14.207.780,00	12.622.400,00	0,00	0,00	12.622.400,00	88,84	1.585.380,00
4.11 . 4.11.01.01 . 28.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.867.100,00	3.735.000,00	0,00	0,00	3.735.000,00	29,03	9.132.100,00
JUMLAH		908.284.738,00	604.744.784,00	0,00	105.800.000,00	710.544.784,00	78,23	197.739.954,00

Pekanbaru, 31 Desember 2021
CAMAT BAJUIN

NAHRIN FAUZI, S.SOS
 NIP. 19600130 199002 1 002